



2021

INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Provinsi Kalimantan Tengah





2021

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

Provinsi Kalimantan Tengah

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT Provinsi Kalimantan Tengah 2021

I S S N : 2354-7855
Nomor Publikasi : 62000.2159
Katalog : 4102004.62
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xiv + 86 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar Kulit, Infografis, dan Tata Letak :

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Diterbitkan Oleh :

©Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Dicetak Oleh :

CV. APP Digital Printing

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum

: Eko Marsoro

Koordinator Teknis

: Arham Rivai

Penulis

: Mertha Endah Ervina
Muhammad Hanif Naufal

Editor

: Lum'atul Qomariyah
Mertha Endah Ervina

Pengolah Data

: Mokhamad Haris
Endah Kurniawati

Koordinator Perwajahan

: Muhammad Said

Penyunting

: Anandari

Tata Letak

: Mertha Endah Ervina

Gambar Kulit dan Infografis

: Muhammad Hanif Naufal

KATA PENGANTAR

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2021 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kalimantan Tengah antar waktu dan perbandingannya baik antar kabupaten/kota maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan). Data yang digunakan antara lain bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Podes, dan Proyeksi Penduduk 2015-2025 Menurut Hasil SUPAS 2015.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang. Semoga publikasi capaian pembangunan Kalimantan Tengah yang berjudul "**Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2021**" ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Palangka Raya, November 2021

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah,



Eko Marsoro

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 KEPENDUDUKAN	1
Pertumbuhan, Persebaran, dan Komposisi Penduduk	5
Perkawinan Pertama dan Penggunaan Alat/Cara KB	6
BAB 2 KESEHATAN DAN GIZI	11
Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	13
Tingkat Imunitas dan Gizi Balita.....	14
Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan.....	16
BAB 3 PENDIDIKAN	19
Melek Huruf, Partisipasi Sekolah, dan Lama Sekolah	21
Jumlah Siswa Putus Sekolah dan Siswa Mengulang	24
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid, Serta Rasio Murid-Guru dan Rasio Guru-Sekolah.....	25
BAB 4 KETENAGAKERJAAN	27
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	29
Lapangan Pekerjaan Utama	31
Upah/Gaji/Pendapatan Bersih	32
Pekerja Anak (Usia 10-17 Tahun).....	35
Pandemi COVID-19.....	38
BAB 5 TARAF DAN POLA KONSUMSI	41
Pengeluaran Rumah Tangga	43
Konsumsi Energi dan Protein.....	45

BAB 6 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	47
Kualitas Rumah Tinggal.....	49
Fasilitas Rumah Tinggal	50
Status Kepemilikan Rumah Tinggal	51
BAB 7 KEMISKINAN.....	53
Perkembangan Penduduk Miskin di Kalimantan Tengah	55
Perkembangan Penduduk Miskin di Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota.....	56
Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	57
BAB 8 SOSIAL LAINNYA	59
Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi	61
Akses Terhadap Bantuan Sosial.....	63
Tindak Kejahatan	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Indikator Demografi Kalimantan Tengah, 2017-2021	6
Tabel 2.1.	Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (E_0) Kalimantan Tengah, 2017-2021	14
Tabel 2.2.	Beberapa Indikator Kesehatan Kalimantan Tengah, 2019-2021	15
Tabel 2.3.	Persentase Perempuan yang Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kalimantan Tengah, 2019-2021	17
Tabel 2.4.	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kalimantan Tengah, 2019-2021	17
Tabel 2.5.	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Kesehatan Per 100 Penduduk di Kalimantan Tengah, 2011, 2014, dan 2018	18
Tabel 3.1.	Beberapa Indikator Pendidikan (Persen), 2019-2021	22
Tabel 3.2.	Perkembangan Jumlah Siswa Putus Sekolah dan Siswa Mengulang Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018 – 2019/2020	24
Tabel 3.3.	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid, Serta Rasio Murid-Guru dan Rasio Guru-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, 2019/2020 – 2020/2021	25
Tabel 4.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2019 – 2021	29
Tabel 4.2.	Penduduk Usia 10-17 Tahun Menurut Karakteristik, 2020	36
Tabel 4.3.	Persentase Anak yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2020	37
Tabel 4.4.	Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Terdampak Covid-19 (ribu orang), Agustus 2021	38
Tabel 5.1.	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kalimantan Tengah, 2019-2021	43
Tabel 5.2.	Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita ¹ dan Indeks Gini ² di Kalimantan Tengah, 2018-2021	44
Tabel 5.3.	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari di Kalimantan Tengah, 2019-2021	45

Tabel 6.1.	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kalimantan Tengah, 2019-2021	49
Tabel 6.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kalimantan Tengah, 2019-2021	50
Tabel 6.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kalimantan Tengah, 2019-2021	52
Tabel 7.1.	Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Kalimantan Tengah, Maret 2015- Maret 2021	55
Tabel 7.2.	Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2018-2021	56
Tabel 7.3.	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Kearifan Kemiskinan di Kalimantan Tengah, 2018-2021	57
Tabel 8.1.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon dan Komputer/Laptop di Kalimantan Tengah, 2018-2021.....	61
Tabel 8.2.	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Mempunyai Akses Terhadap Telepon Seluler dan Akses Internet di Kalimantan Tengah, 2018-2021 ¹⁾	62
Tabel 8.3.	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2019-2021	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2019-2021	7
Gambar 1.2.	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB, 2018-2021	7
Gambar 1.3.	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat atau Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara KB di Kalimantan Tengah, 2019-2021.....	8
Gambar 2.1.	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita di Kalimantan Tengah (per 1.000 Kelahiran), 1994-2017.....	13
Gambar 2.2.	Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang Menerima ASI Eksklusif di Kalimantan Tengah, 2018-2021.....	15
Gambar 2.3.	Persentase Anak Usia 12-23 Bulan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan yang Menerima Imunisasi Lengkap di Kalimantan Tengah, 2018-2021.....	16
Gambar 4.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan (Persen), 2019 - 2021	30
Gambar 4.2.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Perubahan Distribusi Y-on-Y, 2021	31
Gambar 4.3.	Rata-Rata Upah/Gaji Bersih* Selama Sebulan Buruh/Karyawan Menurut Jenis Kelamin (ribu rupiah), 2018-2020	32
Gambar 4.4.	Rata-Rata Upah/Gaji Bersih* Selama Sebulan Buruh/Karyawan Menurut Daerah Tempat Tinggal (ribu rupiah), 2018-2020	33
Gambar 4.5.	Rata-Rata Pendapatan Bersih Selama Sebulan Pekerja Berusaha Sendiri* Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (ribu rupiah), 2020.....	34
Gambar 4.6.	Rata-Rata Pendapatan Bersih Selama Sebulan Pekerja Bebas* Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu rupiah), 2020.....	35
Gambar 4.7.	Jumlah Anak Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin serta Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, 2020.....	36

Gambar 4.8.	Persentase Anak Usia 10 - 17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal, 2020	37
Gambar 6.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kalimantan Tengah, 2021	51
Gambar 7.1.	Perkembangan Penduduk Miskin di Kalimantan Tengah, Maret 2015- Maret 2021	55
Gambar 8.1.	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir di Kalimantan Tengah, 2021	63
Gambar 8.2.	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Kalimantan Tengah, 2017-2020	65

<https://kalteng.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2019-2021	71
Lampiran 2.	Persentase Luas Provinsi, Kepadatan Penduduk, dan Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2019-2021	72
Lampiran 3.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2020-2021	73
Lampiran 4.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Tidak Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional untuk Menunda atau Mencegah Kehamilan Menurut Alasan Utama Tidak Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional KB, 2021	74
Lampiran 5.	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah, Agustus 2021	75
Lampiran 6.	Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah, Agustus 2021	76
Lampiran 7.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dan Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Kalimantan Tengah, 2021	77
Lampiran 8.	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2021	78
Lampiran 9.	Persentase Rumah Tangga Yang Menerima PIP dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2021	79



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT *Provinsi Kalimantan Tengah* 2021

41,80 persen

Angka Beban Ketergantungan

setiap 100 orang yang berusia kerja (penduduk usia produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi



8,27 persen

Angka Kesakitan

angka kesakitan atau persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan Kalimantan Tengah berhasil menurun



66,70 persen

Angka Partisipasi Sekolah (16-18)

masih ada sekitar 33,30 persen penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun yang tidak bersekolah



4,53 persen

Tingkat Pengangguran Terbuka

penduduk usia kerja yang tidak mampu terserap dalam pasar kerja di Kalimantan Tengah sebesar 4,53 persen



5,16 persen

Persentase Penduduk Miskin

persentase penduduk miskin di Kalimantan Tengah cenderung menurun



BAB 1

KEPENDUDUKAN

2,72
Juta jiwa

Jumlah Penduduk
Kalimantan Tengah
Tahun 2021



Persentase Penduduk Usia **0-14** Tahun

24,74 persen

Persentase Penduduk Usia **15-64** Tahun

70,52 persen



Persentase Penduduk Usia **65** Tahun ke Atas

4,74 persen

1 KEPENDUDUKAN

Penduduk atau manusia merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Sebagai subjek, penduduk merupakan sumber daya penggerak pembangunan dan sebagai obyek, penduduk adalah pihak yang dibangun sekaligus penikmat hasil pembangunan. Jadi, penduduk adalah pelaku dan tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.

Isu kependudukan tidak bisa dilepaskan dari tiga hal yaitu kuantitas penduduk (jumlah, komposisi, distribusi, dan struktur umur), kualitas penduduk (pendidikan, keterampilan, dan pekerjaan), dan mobilitas penduduk (perpindahan permanen, non permanen, dan migrasi internasional).

Di sisi lain, penduduk merupakan potensi sekaligus tantangan bagi keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal pembangunan yang kuat. Sebaliknya hal ini akan menjadi malapetaka jika kualitasnya rendah. Jumlah penduduk yang besar memiliki kebutuhan yang besar pula, di antaranya kebutuhan pangan dan energi.

Pertumbuhan, Persebaran, dan Komposisi Penduduk

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan yang terluas dibanding provinsi lain yang ada di Pulau Kalimantan. Namun, jumlah penduduknya termasuk yang paling sedikit setelah Kalimantan Utara. Setiap

tahun jumlah penduduk Kalimantan Tengah terus bertambah dengan laju pertumbuhan penduduk relatif terkendali.

Berdasarkan proyeksi penduduk hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, jumlah penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2021 mencapai 2,7 juta orang, meningkat 35.916 orang dari tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Tengah terus menurun setiap tahun dan selama 2020-2021 penduduk Kalimantan Tengah tumbuh 1,34 persen. Kemudian rasio jenis kelamin penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 107,81. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari 100 perempuan, terdapat 107 hingga 108 laki-laki.

Kepadatan Penduduk Kasar (*Crude Population Density*) menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Kepadatan penduduk Kalimantan Tengah tahun 2021 berkisar pada angka 18 orang/km². Angka tersebut meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya yang berada dikisaran 17 orang/km². Data kepadatan penduduk berguna dalam pengambilan kebijakan pemerataan penduduk. Sementara itu, persebaran penduduk di Kalimantan Tengah masih terpusat pada beberapa kabupaten induk yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya.

Tabel 1.1. Indikator Demografi Kalimantan Tengah, 2017-2021

Indikator Demografi	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki (Orang)	1.340.648	1.359.117	1.377.200	1.394.863	1.412.208
Perempuan (Orang)	1.234.146	1.253.509	1.272.603	1.291.389	1.309.960
Jumlah Penduduk (Orang)	2.574.794	2.612.626	2.649.803	2.686.252	2.722.168
Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen/tahun)	1,52	1,47	1,42	1,38	1,34
Rasio Jenis Kelamin (persen)	108,63	108,42	108,22	108,01	107,81
Kepadatan Penduduk (orang/km ²)	16,77	17,01	17,26	17,49	17,73
Komposisi Penduduk (persen)					
0-14 tahun	26,01	25,68	25,36	25,04	24,74
15-64 tahun	70,24	70,36	70,45	70,51	70,52
65+ tahun	3,75	3,96	4,19	4,45	4,74
<i>Dependency Ratio</i> (persen)	42,37	42,13	41,94	41,82	41,80
DR Muda (persen)	37,03	36,51	36,00	35,52	35,09
DR Tua (persen)	5,34	5,62	5,94	6,30	6,71

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2025 Menurut Hasil SUPAS 2015, BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Gambaran komposisi penduduk bermanfaat dalam perencanaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar merupakan motor penggerak pembangunan jika disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Jika tidak, hal ini justru akan menjadi hambatan karena akan menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan komposisi umur, penduduk Kalimantan Tengah masih didominasi usia produktif (15-64 tahun). Proporsi usia produktif terus meningkat hingga menyebabkan *dependency ratio* (DR) terus menurun. Menurunnya *dependency ratio* menunjukkan berkurangnya beban ekonomi bagi penduduk usia produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk usia tidak produktif. Pada tahun 2021,

dependency ratio Kalimantan Tengah sebesar 41,80 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi. Kondisi *dependency ratio* di bawah 50 persen disebut sebagai bonus demografi.

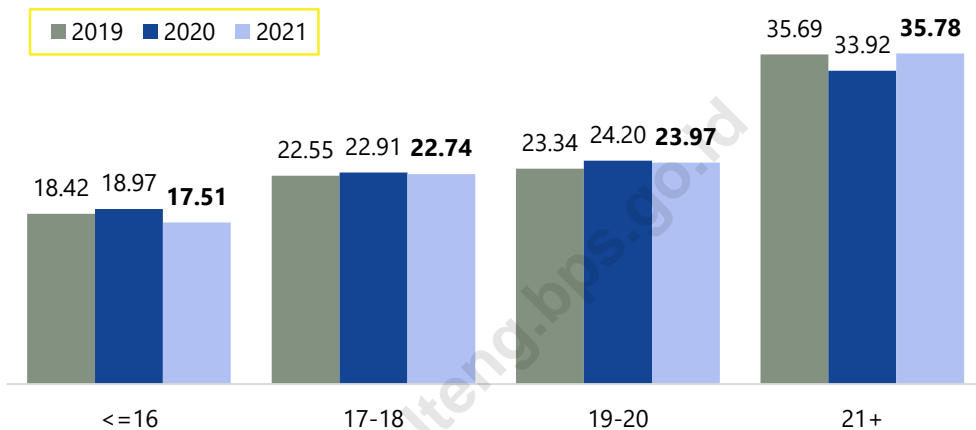
Perkawinan Pertama dan Penggunaan Alat/Cara KB

Fertilitas merupakan salah satu faktor pendorong dalam pertumbuhan penduduk. Fertilitas erat kaitannya dengan usia perkawinan pertama bagi perempuan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal pernikahan, yakni 19

tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Bahkan menurut BKKBN, pernikahan sebaiknya dilakukan pada usia matang yaitu minimal usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria. Rekomendasi BKKBN tersebut bertujuan

demikian kebaikan masyarakat itu sendiri, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga dan bisa berpikir dewasa.

Gambar 1.1. Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2019-2021

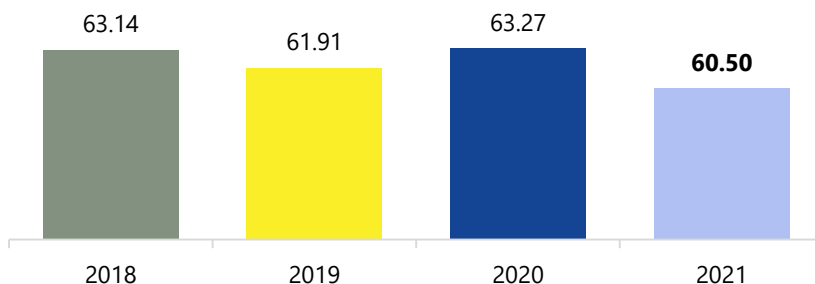


Sumber: Susenas 2019-2021, BPS

Pada tahun 2021, kurang dari 36 persen perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia di atas 21 tahun. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Walaupun begitu, perihal usia perkawinan pertama tetap perlu terus

mendapatkan perhatian. Karena bila terjadi pernikahan di usia yang terlalu muda dapat mendorong adanya kehamilan pada wanita muda. Tentu saja, hal tersebut dapat berisiko untuk kesehatan dan keselamatan baik bagi anak maupun ibunya.

Gambar 1.2. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Pernah Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB, 2018-2021

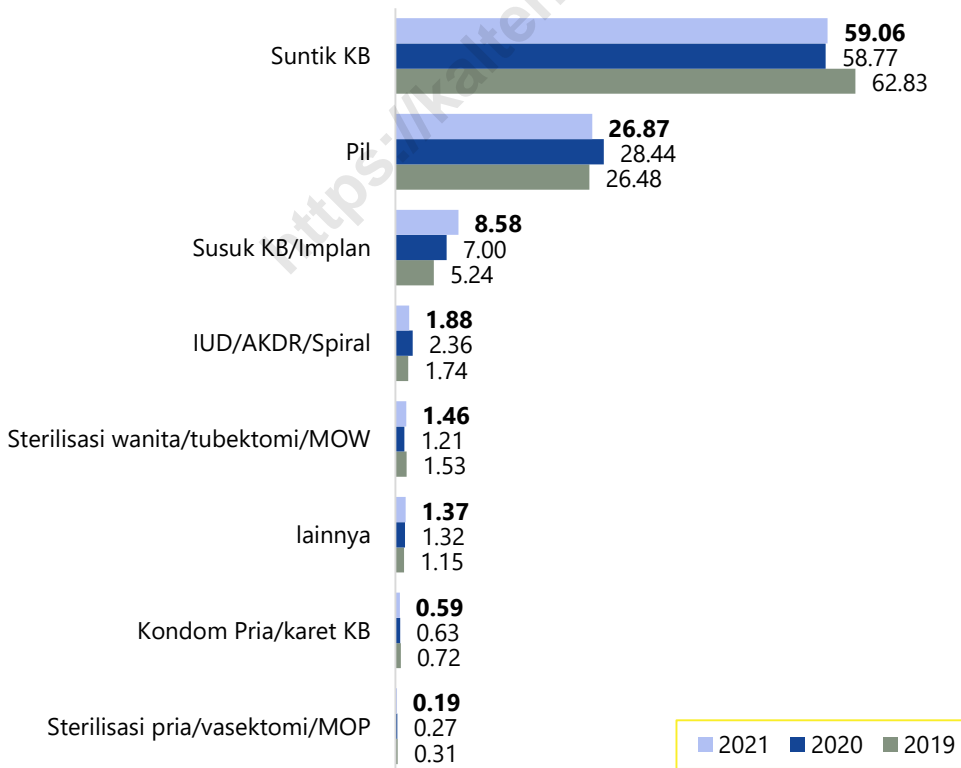


Sumber: Susenas 2018-2021, BPS

Salah satu upaya dalam Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) untuk pengendalian fertilitas atau menekan pertumbuhan penduduk yang paling efektif adalah dengan penggunaan alat kontrasepsi. Dengan penggunaan alat kontrasepsi bagi perempuan ataupun pasangannya dapat mengurangi risiko kematian ibu melalui upaya pencegahan kehamilan, penundaan usia kehamilan, serta menjarangkan kehamilan. Untuk itu, Informasi mengenai tingkat pemakaian kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan Program KKBPK.

Pada tahun 2021, persentase wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan alat KB cenderung turun, yaitu dari 63,27 persen pada tahun 2020 menjadi 60,50 persen. Wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang tidak sedang menggunakan alat KB menyatakan berbagai macam alasan mengapa tidak menggunakan alat/metode KB, yaitu masalah kesuburan, takut efek samping, tidak setuju dengan KB, memang tidak tahu perihal manfaat alat/metode KB, dan alasan lainnya.

Gambar 1.3. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat atau Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara KB di Kalimantan Tengah, 2019-2021



Sumber: Susenas 2019-2021, BPS

Dari berbagai jenis alat/cara KB, suntik KB masih yang paling banyak diminati hingga sekarang. Lebih dari separuh wanita usia 15-49 tahun dan berstatus kawin di Kalimantan Tengah menggunakan metode kontrasepsi ini. Jenis alat/cara KB lain yang cukup banyak digunakan adalah pil KB. Namun, persentase pengguna pil KB mengalami penurunan pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020. Sebaliknya, penggunaan susuk KB/Implan dan metode sterilisasi wanita/tubektomi/MOW menjadi lebih

diminati pada tahun 2021. Sementara itu, kondom pria/karet KB yang cukup bebas dijual di pasaran ternyata persentase penggunaannya terus menurun selama kurun waktu 2019-2021, yaitu dari 0,72 persen pada tahun 2019 menjadi 0,59 persen pada tahun 2021. Besarnya perhatian pemerintah terhadap kondisi fertilitas penduduk selain untuk pengendalian penduduk juga dikarenakan indikator fertilitas dapat menjadi ukuran terjaminnya kondisi kesehatan masyarakat yang berujung pada tingkat kesejahteraan.

BAB 2

KESEHATAN DAN GIZI



Persentase penduduk
yang berobat jalan
Tahun 2021

25,59
persen

61,10
persen

Penduduk yang berobat jalan berobat ke
Praktek Dokter/Bidan/Klinik/
Praktek Dokter Bersama/Petugas kesehatan

Umur Harapan Hidup
Saat Lahir (E0)
Tahun 2021

69,79
tahun



2 KESEHATAN DAN GIZI

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

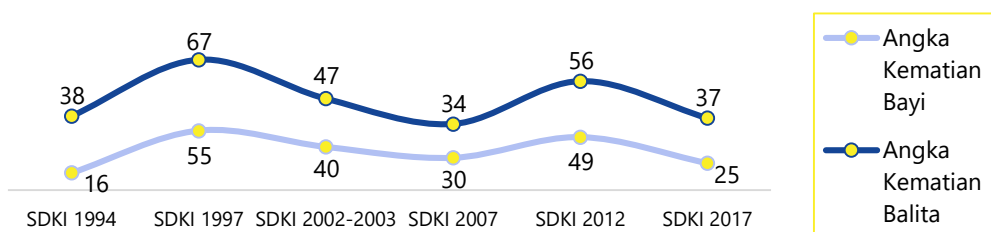
Indikator status kesehatan menunjukkan derajat kesehatan penduduk. Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Derajat kesehatan masyarakat dapat digambarkan melalui Angka Kematian (Mortalitas), Umur Harapan Hidup (UHH), dan Angka Kesakitan (Morbiditas). Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan

tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi tersebut. Makin rendahnya AKB menunjukkan derajat/tingkat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi, dan sebaliknya. Hal yang mengindikasikan bahwa pencegahan dan pemberantasan penyebab kematian bayi (anak usia 0 tahun) berhasil antara lain, kondisi sosial ekonomi suatu daerah; kebersihan lingkungan, ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan; pengetahuan kesehatan keluarga tentang status gizi ibu hamil, pemberian ASI, dan imunisasi.

Dari hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa AKB tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, yaitu dari 49 bayi menjadi 25 bayi per 1000 kelahiran hidup. Kondisi serupa juga terjadi pada Angka Kematian Balita (AKBA), dimana pada tahun 2012 sebesar 56 balita (0-4 tahun) turun menjadi 37 balita per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017.

Gambar 2.1. Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita di Kalimantan Tengah (per 1.000 Kelahiran), 1994-2017



Sumber: Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), BPS

Tabel 2.1. Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (E_0) Kalimantan Tengah, 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E_0 Laki-laki	67,69	67,74	67,79	67,84	...
E_0 Perempuan	71,50	71,55	71,60	71,66	...
E_0 Laki-laki + Perempuan	69,59	69,64	69,69	69,74	69,79

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2021, BPS

Status kesehatan penduduk selama 2017-2021 terlihat membaik sejalan dengan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir. Pada tahun 2021, umur harapan hidup tercatat 69,79 tahun artinya bayi yang lahir tahun 2021 memiliki peluang hidup hingga 69,79 tahun. Selama 2017-2020, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, peluang bertahan hidup untuk bayi perempuan lebih panjang empat tahun daripada bayi laki-laki. Hal ini disebabkan selain secara genetik laki-laki lebih rentan penyakit, juga karena pola hidup masyarakat.

Status kesehatan penduduk juga tercermin dari angka kesakitan (morbiditas) atau persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya, keluhan kesehatan yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, dan sakit gigi. Pada tahun 2021, angka kesakitan atau persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan di Kalimantan Tengah berhasil turun dari 11,34 persen pada tahun 2020 menjadi 8,27 persen. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang cenderung membaik.

Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Salah satu prioritas utama pemerintah saat ini adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Presiden Jokowi dalam pidato visi Indonesia 14 Juli 2019 menyebutkan bahwa titik dimulainya pembangunan SDM dimulai dari usaha untuk menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, balita, dan anak usia sekolah.

Menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan dalam Profil Statistik Kesehatan 2019, kecukupan gizi balita di mulai dari seribu hari pertama kehidupan (HPK). Seribu HPK yang meliputi 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi dilahirkan merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan. Apabila mengalami masalah gizi pada periode tersebut, anak-anak akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.

Untuk asupan dan imunitas balita, pemberian Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan dan dilanjutkan hingga berusia 24 bulan. Pemerintah juga menyediakan program imunisasi dasar gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan/daya tahan tubuh balita.

Tabel 2.2. Beberapa Indikator Kesehatan Kalimantan Tengah, 2019-2021

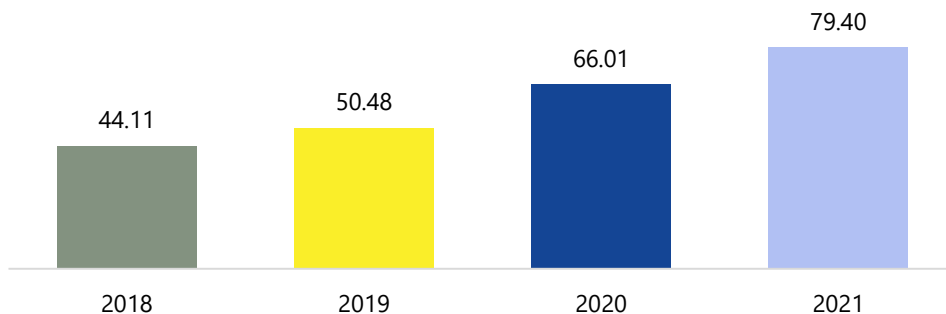
Indikator	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Angka Kesakitan (%)	12,32	11,27	9,05	12,88	11,38	11,38	12,66	11,34	8,27
Anak Usia Kurang dari 2 tahun yang pernah disusui (%)	89,17	90,19	92,90	95,41	92,54	92,54	92,77	91,53	92,74
Rata-rata lama Disusui (bulan)	9,66	9,84	10,98	9,88	10,63	10,63	9,79	10,29	10,61
Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi									
BCG	86,21	87,89	86,22	85,63	85,70	82,75	85,85	86,58	84,14
DPT	81,92	81,22	82,67	80,00	80,65	78,70	80,75	80,88	80,30
Polio	85,64	86,29	87,38	86,90	86,70	84,61	86,40	86,54	85,72
Campak	65,24	65,15	69,34	64,50	65,77	64,72	64,79	65,52	66,58
Hepatitis B	83,35	82,68	83,32	75,32	80,25	78,86	78,46	81,23	80,66

Sumber: Susenas Maret 2019-2021, BPS

Kesadaran untuk memberikan ASI di Kalimantan Tengah memang tergolong tinggi. Pada tahun 2021, dari 100 anak usia di bawah 2 tahun (baduta), 92 sampai 93 anak pernah disusui, tetapi dengan rata-rata lama pemberian ASI hanya 11 bulan. Anak usia 0-5 bulan yang menerima ASI eksklusif sebesar 79,40 persen, artinya hampir 21

persen anak usia 0-5 bulan tidak menerima ASI eksklusif. Beberapa hambatan dalam pemberian ASI antara lain: rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga mengenai ASI, kurangnya pelayanan konseling laktasi dari petugas kesehatan, kondisi yang kurang memadai bagi para ibu bekerja, dan gencarnya pemasaran susu formula.

Gambar 2.2. Persentase Anak Usia 0-5 Bulan yang Menerima ASI Eksklusif di Kalimantan Tengah, 2018-2021



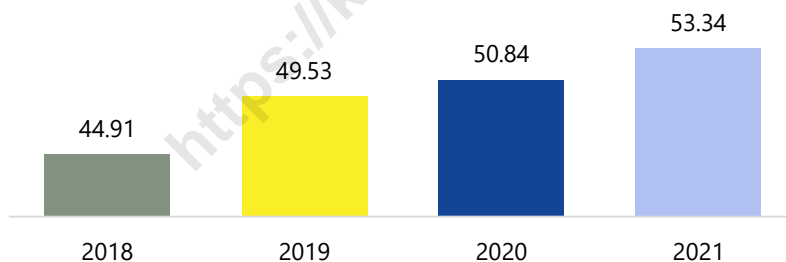
Sumber: Susenas Maret 2018-2021, BPS

Dari sisi imunisasi, balita yang mendapatkan vaksin dalam imunisasi dasar pada tahun 2021 cenderung meningkat dibanding 2020. Seorang anak dikatakan menerima imunisasi dasar lengkap atau yang sekarang dikenal dengan imunisasi rutin lengkap adalah apabila telah menerima 1 (satu) kali imunisasi *Bacillus Calmette-Guérin* (BCG), 3 (tiga) kali imunisasi *Diphtheria-Pertussis-Tetanus* (DPT), 3 (tiga) kali imunisasi Polio, 3 (tiga) kali imunisasi Hepatitis B, dan 1 (satu) kali imunisasi Campak.

Pada tahun 2021, hanya 53 dari 100 anak usia 12-23 bulan yang telah menerima imunisasi dasar lengkap. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat pentingnya manfaat

imunisasi terhadap status kesehatan masyarakat. Beberapa alasan pentingnya pemberian vaksin dalam program imunisasi, yaitu vaksin dapat meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah penyakit lebih parah, serta menghemat biaya perawatan dan pengobatan, bahkan dapat menyelamatkan jiwa. Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, lebih banyak anak usia 12-23 bulan di daerah perkotaan yang memperoleh imunisasi dasar dibandingkan anak di perdesaan, masing-masing sebesar 54,01 persen dan 52,79 persen. Beberapa penyebabnya adalah akses terhadap fasilitas dan akses terhadap pengetahuan di perkotaan lebih mudah dibanding di perdesaan.

Gambar 2.3. Persentase Anak Usia 12-23 Bulan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan yang Menerima Imunisasi Lengkap di Kalimantan Tengah, 2018-2021



Sumber: Susenas Maret 2018-2021, BPS

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Upaya pembangunan kesehatan di Kalimantan Tengah diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Angka Kematian Ibu dan Anak merupakan dua indikator yang peka terhadap kualitas fasilitas pelayanan

kesehatan. Salah satu sasaran program untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah dengan meningkatkan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan, serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah dan kualitasnya.

Tabel 2.3. Persentase Perempuan yang Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kalimantan Tengah, 2019-2021

Indikator	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Kesehatan			
Dokter Kandungan	21,66	20,60	21,22
Dokter Umum	0,81	0,89	1,01
Bidan	66,18	66,22	64,47
Perawat/Tenaga Kesehatan Lainnya	1,76	0,83	1,74
Bukan Tenaga Kesehatan			
Dukun Beranak, paraji	9,32	11,18	11,23
Lainnya	0,26	0,29	0,33

Sumber: Susenas Maret 2019-2021, BPS

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari persentase perempuan yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan di tahun 2021 mencapai 88,44 persen. Bidan masih menjadi primadona penolong persalinan.

Persentase perempuan usia 15-49 tahun yang proses bersalinnya ditolong oleh bidan mencapai 64,47 persen. Hal ini disebabkan oleh faktor aksesibilitas keberadaan bidan yang mudah ditemui baik di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan.

Tabel 2.4. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kalimantan Tengah, 2019-2021

Indikator	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat			
Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	15,87	15,46	11,50
Praktek Dokter/Bidan/Klinik/Praktek Dokter Bersama/Petugas kesehatan	42,80	44,64	61,10
Puskesmas/Pustu	44,43	40,04	24,76
UKBM *)	3,70	4,69	5,36
Pengobatan Tradisional	1,42	0,72	0,80
Lainnya	1,32	1,19	1,49
% penduduk yang berobat jalan	32,92	31,48	25,59

Sumber: Susenas Maret 2019-2021, BPS

Keterangan: *) UKBM terdiri dari POSKESDES, POLINDES, POSYANDU, Balai Pengobatan.

Faktor aksesibilitas juga memengaruhi keinginan penduduk untuk berobat saat

mengalami keluhan sakit. Persentase penduduk yang berobat jalan pada

tahun 2021 sebesar 25,59 persen menurun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tempat berobat, Praktek Dokter/Bidan/Klinik/Praktek Dokter Bersama/Petugas kesehatan masih menjadi tujuan utama masyarakat berobat jalan. Sebagian besar penduduk juga memeriksakan dirinya ke puskesmas/pustu. Kondisi ini bisa jadi dikarenakan kemudahan dalam akses, antrian yang lebih pendek, tingkat kepercayaan, atau biaya yang lebih terjangkau.

Ketersediaan tenaga kesehatan medis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terus diusahakan oleh pemerintah. Hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan BPS setiap tiga tahun sekali menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga dokter relatif stabil, yaitu sekitar 3 dokter per 100

penduduk. Sementara untuk rasio tenaga kesehatan bidan dan tenaga kesehatan lainnya cenderung mengalami peningkatan. Sementara itu, jumlah dukun bayi menurun meskipun rasionya cenderung stabil.

Secara garis besar, pemerintah terus mengupayakan pembangunan di bidang kesehatan terutama penyediaan tenaga dan fasilitas kesehatan, guna mengatasi persoalan kematian ibu dan bayi serta perbaikan dalam derajat dan status kesehatan penduduk. Tidak dapat dipungkiri permasalahan kesehatan berkaitan erat dengan kemiskinan dan lingkungan. Oleh karena itu, adanya jaminan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberian bimbingan kebersihan sejak dini kepada penduduk menjadi penting tercantum dalam program pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.5. Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio Tenaga Kesehatan Per 100 Penduduk di Kalimantan Tengah, 2011, 2014, dan 2018

Tenaga Kesehatan	Jumlah			Rasio		
	2011	2014	2018	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dokter	286	333	306	3	3	3
Bidan	891	1.066	1.186	9	11	12
Tenaga Kesehatan Lainnya	892	902	1.034	9	9	10
Dukun Bayi	1.374	1.433	1.389	14	14	14

Sumber: Pendataan Potensi Desa (Podes), BPS

BAB 3

PENDIDIKAN

**Angka
Partisipasi
Murni**
SD/Sederajat **99,01** persen

**Angka
Partisipasi
Murni**
SMP/Sederajat **78,80** persen

**Angka
Partisipasi
Murni**
SMA/Sederajat **54,25** persen

**Rata-rata
Lama Sekolah
Tahun 2021**
8,64
tahun



Pembangunan dalam bidang pendidikan telah disepakati para pemimpin dunia yang dituangkan dalam Tujuan ke-4 Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Selaras dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dengan mengusung 7 prioritas nasional, dimana prioritas nasional yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan memperoleh pendidikan yang baik, diharapkan setiap orang mampu mengelola hidupnya dan mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi.

Melek Huruf, Partisipasi Sekolah, dan Lama Sekolah

Angka Melek Huruf (AMH) adalah indikator dasar untuk melihat kemampuan penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll). Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan masyarakat dewasa yang seharusnya dapat membaca dan menulis. Secara umum, penduduk di Kalimantan Tengah sudah bisa membaca dan menulis. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar satu

persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis pada tahun 2021.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah tahun 2021, mencapai 71,25 atau berada pada status pembangunan manusia tinggi. Salah satu dimensi pembentuk pembangunan manusia adalah dimensi pendidikan yang terdiri dari Rata-rata lama sekolah/RLS (*Mean Year Schooling/MYS*) dan Harapan Lama Sekolah/HLS (*Expected Year of Schooling/EYS*).

RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Setiap tahun, rata-rata lama sekolah penduduk di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan meskipun tidak banyak. Hingga tahun 2021, rata-rata lama sekolah yang pernah dijalani penduduk usia 25 tahun ke atas di Kalimantan Tengah yaitu 8,64 tahun atau hampir menyelesaikan Pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas 3).

Sementara itu, HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan. HLS di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 telah mencapai 12,74 tahun, artinya anak usia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 12,74 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk

menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. HLS ini juga menunjukkan pembangunan sistem

pendidikan di Kalimantan Tengah sudah diarahkan pada pemenuhan program wajib belajar 12 tahun.

Tabel 3.1. Beberapa Indikator Pendidikan (Persen), 2019-2021

Indikator	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Penduduk Usia 15+ Tahun									
Angka Melek Huruf (AMH)	99,97	99,65	99,34	99,69	98,69	98,83	99,84	99,20	99,10
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,83	8,89	...	8,16	8,25	...	8,51	8,59	8,64
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,57	12,67	...	12,65	12,66	...	12,57	12,66	12,74
Angka Partisipasi Sekolah (APS)									
7-12 tahun	99,57	99,26	99,51	99,76	99,74	99,60	99,66	99,49	99,55
13-15 tahun	94,37	93,36	95,43	93,79	96,41	94,99	94,09	94,86	95,21
16-18 tahun	65,59	66,67	68,93	68,42	67,20	64,51	66,95	66,92	66,70
19-24 tahun	26,50	25,56	24,98	21,24	22,89	23,92	23,98	24,26	24,47
Angka Partisipasi Kasar (APK)									
SD	110,43	108,77	108,64	109,66	108,19	107,78	110,05	108,49	108,21
SMP	87,50	92,62	91,66	90,08	88,51	90,47	88,74	90,61	91,07
SMA	82,30	80,47	86,38	82,23	84,28	79,82	82,27	82,29	83,07
Perguruan Tinggi (PT)	22,93	21,22	21,97	19,26	21,85	22,06	21,18	21,52	22,01
Angka Partisipasi Murni (APM)									
SD	99,25	99,04	99,00	99,03	99,18	99,02	99,14	99,11	99,01
SMP	77,26	78,60	78,08	78,20	78,29	79,53	77,71	78,45	78,80
SMA	53,05	54,00	55,31	54,64	54,18	53,22	53,82	54,08	54,25
Perguruan Tinggi (PT)	16,27	15,09	14,79	12,83	14,17	15,06	14,62	14,64	14,92

Sumber: Susenas Maret 2019-2021, BPS

Indikator partisipasi sekolah digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah diberikan pemerintah, dan juga untuk melihat apakah target yang ditetapkan pemerintah tercapai. Selain itu, partisipasi sekolah menggambarkan efektivitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat, yang artinya semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin

efektifnya suatu program. Semakin tinggi partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator yang menggambarkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang

pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada tahun 2021, APS tertinggi berada pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu sebesar 99,55 persen, artinya hampir semua anak usia 7-12 tahun di Kalimantan Tengah sedang bersekolah.

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa semakin meningkat kelompok umur, nilai APS semakin menurun. Hal ini menandakan bahwa semakin bertambah usia penduduk, partisipasi sekolahnya semakin berkurang. APS pada kelompok umur 16-18 sebesar 66,70 persen, artinya masih ada sekitar 33,30 persen penduduk pada kelompok umur ini yang tidak bersekolah. Padahal pemerintah sedang gencar mengusahakan wajib belajar 12 tahun, sehingga hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. APK SD Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebesar 108,21 persen, artinya persentase penduduk berusia 7-12 tahun di Kalimantan Tengah yang bersekolah di tingkat SD/ sederajat sekitar 108 persen.

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut). APM suatu jenjang pendidikan yang masih belum mencapai angka 100 persen menunjukkan bahwa penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa pola APM memiliki kemiripan dengan pola APS dan APK. APM SD memiliki nilai paling tinggi kemudian semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. APM SD Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebesar 99,01 persen, artinya sekitar 99 persen penduduk yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu

dijengang SD/ sederajat. Selama tahun 2019-2021, APM SMP hingga APM Perguruan Tinggi (PT) mengalami peningkatan, namun APM SD mengalami sedikit penurunan. Kemudian jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, APM perempuan dan APM laki-laki tidak memperlihatkan perbedaan yang berarti.

Jumlah Siswa Putus Sekolah dan Siswa Mengulang

Jumlah siswa putus sekolah menggambarkan jumlah anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau tidak menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Banyak faktor yang menyebabkan anak terpaksa putus sekolah, diantaranya adalah karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keterbatasan ekonomi, pekerja anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan, atau minimnya fasilitas pendidikan di suatu daerah.

Jumlah siswa putus sekolah dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK selama tahun ajaran 2018/2019, hingga 2019/2020 cenderung mengalami penurunan. Selain itu, semakin tinggi jenjang pendidikan, tercatat jumlah siswa putus sekolah juga semakin meningkat. Peningkatan ini salah satunya disebabkan karena jarak sekolah yang terlalu jauh dan sulit diakses, dimana kebanyakan sekolah terutama jenjang SMA/SMK berada di pusat kecamatan atau kabupaten/kota, sehingga banyak anak yang tidak meneruskan sekolahnya.

Sementara itu, jumlah siswa mengulang tahun ajaran 2019/2020 mengalami peningkatan hampir pada semua jenjang, kecuali pada jenjang SD. Jumlah siswa mengulang SMP, SMA, dan SMK berkisar antara 150 hingga 500 siswa, sedangkan jumlah siswa mengulang SD lebih dari 5000 siswa dan merupakan yang tertinggi di antara semua jenjang.

Tabel 3.2. Perkembangan Jumlah Siswa Putus Sekolah dan Siswa Mengulang Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018 – 2019/2020

Indikator	Tahun Ajaran		
	2017/2018	2018/2019	2019/2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Siswa Putus Sekolah			
SD	380	676	800
SMP	548	1.055	513
SMA	329	821	231
SMK	467	1.067	233
Siswa Mengulang			
SD	6.711	6.252	5.447
SMP	346	415	519
SMA	98	93	163
SMK	145	136	159

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (<http://statistik.data.kemdikbud.go.id/>)

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid, Serta Rasio Murid-Guru dan Rasio Guru-Sekolah

Pemerataan pendidikan perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Pada tahun ajaran 2020/2021, jumlah sekolah dan murid di Kalimantan Tengah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun, terjadi peningkatan pada jumlah tenaga pengajar/guru. Hal tersebut menyebabkan penurunan rasio murid-guru dan peningkatan rasio guru-sekolah pada tahun ajaran 2020/2021 di semua jenjang pendidikan.

Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang

sekolah dengan jumlah guru. Rasio murid-guru menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Sebaliknya semakin kecil rasio murid-guru maka akses murid terhadap guru akan semakin mudah. Hal ini memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa secara individu sehingga mendukung prestasi siswa menjadi lebih baik. Pada semua jenjang pendidikan terjadi penurunan rasio murid-guru selama tahun ajaran 2020/2021, yang artinya semakin meningkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid.

Tabel 3.3. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid, Serta Rasio Murid-Guru dan Rasio Guru-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, 2019/2020 - 2020/2021

Jenjang Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid-Guru	Rasio Guru-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2019/2020					
SD/MI	2.919	28.134	326.298	11,6	9,6
SMP/Mts	1.003	11.707	135.249	11,6	11,7
SMA/MA	323	5.997	73.135	12,2	18,6
SMK	137	2.936	36.601	12,5	21,4
2020/2021					
SD/MI	2.901	28.300	324.333	11,5	9,8
SMP/Mts	1.002	12.370	134.344	10,9	12,3
SMA/MA	322	6.166	74.798	12,1	19,1
SMK	135	3.059	37.328	12,2	22,7

Sumber : Publikasi Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021, BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator selanjutnya adalah rasio guru-sekolah. Rasio guru-sekolah adalah perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Makin kecil nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah guru yang mengajar di suatu jenjang pendidikan. Rasio guru-sekolah terkecil ada pada jenjang pendidikan SD/MI yaitu sebesar 9,8. Menurut Permendikbud No.23 Tahun 2013 pasal 2, ayat (2) poin 5,

"Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan."

Artinya jumlah guru SD/MI sudah memadai, namun masalahnya adalah pendistribusian yang tidak merata.

Kondisi geografis dan luasnya wilayah Kalimantan Tengah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memajukan pendidikan. Masih ada beberapa wilayah yang termasuk dalam daerah terpencil perlu mendapat perhatian ekstra. Dengan begitu, anak-anak usia sekolah tetap bisa memperoleh hak mereka untuk mengenyam pendidikan, apakah dengan adanya sekolah satu atap (satap), guru kunjung, atau sistem lainnya, sehingga mereka tidak putus sekolah dan meraih kehidupan yang lebih baik.

BAB 4

KETENAGAKERJAAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021

68,67 persen

Penduduk dengan Jam Kerja
Lebih Pendek Karena Covid-19*

84,85 persen

*dari Total Penduduk Usia Kerja yang Terdampak Covid-19



4 KETENAGAKERJAAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di suatu wilayah. Banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan, antara lain terkait kurangnya lapangan kerja, kurangnya kualitas/kompetensi tenaga kerja, pengangguran, dan produktivitas tenaga kerja.

Gambaran umum tenaga kerja di Kalimantan Tengah terlihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK didefinisikan sebagai persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu negara. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2021, TPAK di Kalimantan Tengah sebesar 68,67 persen, meningkat 0,27 persen poin apabila dibandingkan

dengan kondisi Agustus 2020.

Selanjutnya, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan untuk mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap di pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2021 adalah sebesar 4,53 persen. Hal ini berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar empat sampai lima orang yang menganggur. Pada Agustus 2021, TPT mengalami penurunan sebesar 0,05 persen poin dibanding Agustus 2020.

Bila dilihat dari daerah tempat tinggal, TPT di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan TPT perdesaan, artinya lapangan pekerjaan yang tersedia di perkotaan belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja tersedia. Hal ini terkait dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas dan adanya kecenderungan penyerapan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Sedangkan tenaga kerja di perdesaan sebagian besar terserap di kategori pertanian yang tidak terlalu membutuhkan keahlian khusus.

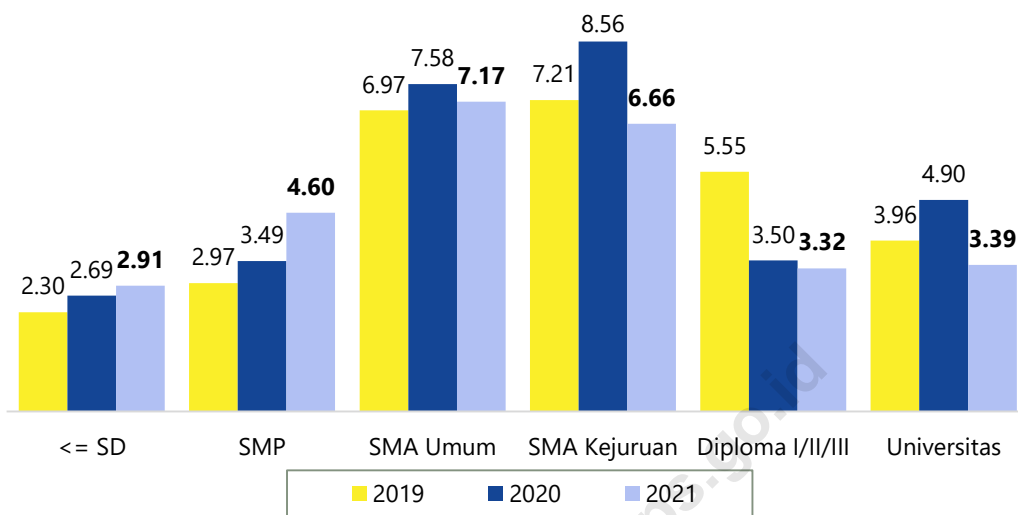
Tabel 4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2019 – 2021

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laki-laki	85,43	84,67	84,70	Perkotaan	4,90	5,13	5,18
Perempuan	51,53	50,57	51,12	Perdesaan	3,46	4,20	4,05
TPAK	69,29	68,40	68,67	TPT	4,04	4,58	4,53

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2019-2021, BPS

Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Gambar 4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan (Persen), 2019 - 2021



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2019-2021, BPS

Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang diharapkan semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Pada kenyataannya, di tahun 2021 pengangguran terbanyak di Kalimantan Tengah merupakan lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU). Penganggur yang berpendidikan SMU ada sebesar 7,17 persen, diikuti penganggur berpendidikan SMK 6,66 persen, dan penganggur berpendidikan SMP 4,60 persen.

Dibandingkan Agustus 2020, semua kategori pendidikan mengalami penurunan TPT kecuali kategori SD ke bawah (meningkat 0,22 persen poin) dan SMP (meningkat 1,11 persen poin). Di sisi lain, selama tahun 2019 hingga 2021, penganggur yang berpendidikan Diploma terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 3,32 persen di tahun 2021.

Banyaknya penganggur yang memiliki pendidikan tinggi disebabkan beberapa hal, antara lain terlalu memilih dan menunggu pekerjaan yang sesuai keahlian, serta kurangnya kompetensi dan kesiapan dalam memasuki dunia kerja. Penduduk yang belum terserap lapangan kerja diharapkan tidak sekedar menunggu datangnya kesempatan kerja tetapi dapat berpartisipasi dengan berwirausaha. Dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti pengembangan ekonomi digital dan kreatif, serta dukungan permodalan. Pelatihan vokasi dalam rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan, serta peningkatan akses pasar diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan mendukung pembangunan daerah.

Lapangan Pekerjaan Utama

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021, tiga lapangan pekerjaan

yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) sebesar 37,55 persen, disusul oleh Perdagangan Besar Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G) sebesar 17,50 persen, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (O) sebesar 7,66 persen.

Gambar 4.2. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Perubahan Distribusi Y-on-Y, 2021

37.55	Pertanian (A)	-0.60	
17.50	Perdagangan (G)		0.14
7.66	Administrasi Pemerintahan (O)		0.11
6.72	Pertambangan dan Penggalian (B)		0.42
5.67	Industri Pengolahan (C)	-0.10	
5.48	Jasa Pendidikan (P)		0.41
4.78	Konstruksi (F)	-0.34	
4.02	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum (I)	-0.11	
3.23	Jasa Lainnya (R,S,T,U)	-0.27	
3.22	Transportasi, Pergudangan, dan Infokom (H,J)		0.13
1.89	Jasa Kesehatan & Keg. Sosial (Q)	-0.08	
1.66	Jasa Perusahaan, Keuangan, dan Real Estate (K,L,M,N)		0.10
0.61	Pengadaan Listrik, Gas, Air (D,E)		0.19

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021, BPS

Keterangan: Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015

Pertanian kini tidak lagi menjadi primadona lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbanyak. Jika dilihat trennya, persentase penduduk yang bekerja pada kategori pertanian mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2021, yaitu dari 39,01 persen pada Agustus 2018 menjadi 37,55 persen pada Agustus 2021.

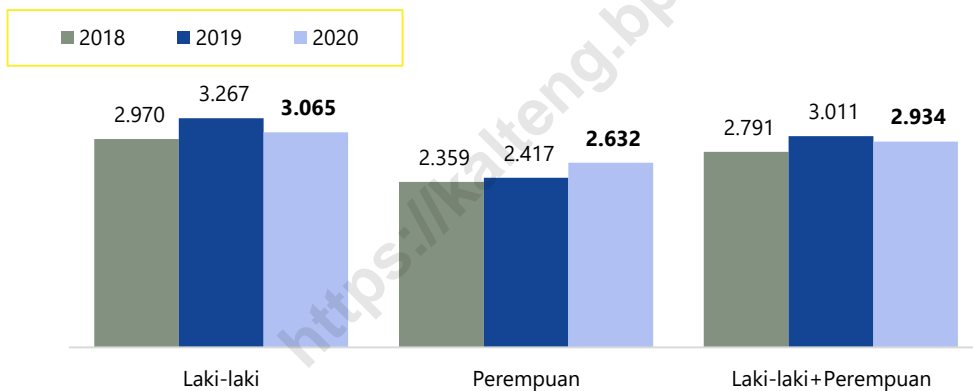
Pada Agustus 2021, lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja bila dibanding Agustus 2020 (*year on year*) terjadi pada lapangan pekerjaan Pertambangan dan Penggalian (B); Jasa Pendidikan (P); Pengadaan Listrik, Gas, dan Air (D,E); Perdagangan Besar Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G); Transportasi,

Pergudangan, Informasi, dan Komunikasi (H,J); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (O); serta Jasa Perusahaan, Keuangan, dan Real Estate (K,L,M,N). Sementara itu, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase penduduk bekerja adalah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A); Konstruksi (F); Jasa Lainnya (R,S,T,U); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I); Industri Pengolahan (C); serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q).

Upah/Gaji/Pendapatan Bersih

Upah/gaji/pendapatan merupakan imbalan yang diterima baik berbentuk uang maupun barang, yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. BPS menggunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkan bayaran yang diterima pekerja. Untuk pekerja yang berstatus buruh/karyawan, bayaran atas tenaga yang dikeluarkan menggunakan istilah upah/gaji. Sementara untuk pekerja non-buruh, yaitu mereka yang berusaha sendiri dan pekerja bebas, menggunakan istilah pendapatan.

Gambar 4.3. Rata-Rata Upah/Gaji Bersih* Selama Sebulan Buruh/Karyawan Menurut Jenis Kelamin (ribu rupiah), 2018-2020



Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2020, BPS

Catatan:

*) Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya.

Hingga Agustus 2021, sebagian besar penduduk bekerja di Kalimantan Tengah berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai (41,59 persen). Pekerja yang berusaha sendiri ada sebanyak 22,10 persen dan yang berstatus sebagai pekerja bebas hanya sebesar 7,26 persen.

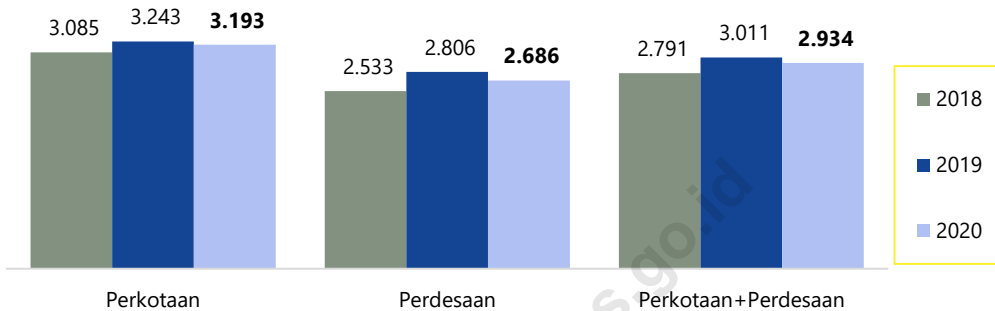
Rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan di Kalimantan Tengah selama sebulan sebesar 2.934.082

rupiah atau bisa dikatakan lebih besar dari upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Tengah tahun 2020 yang sebesar 2.903.144 rupiah. Namun bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan perempuan masih di bawah UMP. Walau begitu rata-rata upah/gaji perempuan terus meningkat, bahkan pada tahun 2020 saat Pandemi Covid-19 terjadi. Pada Agustus 2020, rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan

perempuan di Kalimantan Tengah selama sebulan sebesar 2.632.344 rupiah, meningkat hampir 216 ribu rupiah bila dibanding Agustus 2019,

sedangkan rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan laki-laki sebesar 3.065.478 rupiah, turun 202 ribu rupiah dibanding Agustus 2019.

Gambar 4.4. Rata-Rata Upah/Gaji Bersih* Selama Sebulan Buruh/Karyawan Menurut Daerah Tempat Tinggal (ribu rupiah), 2018-2020



Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2020, BPS

Catatan:

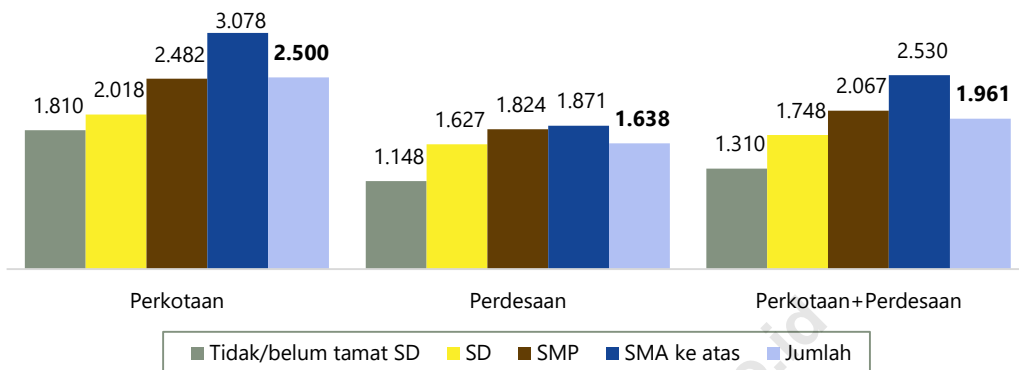
*) Upah/gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya.

Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan di daerah perkotaan dari tahun 2018 hingga 2020 masih di atas rata-rata upah/gaji buruh/karyawan di daerah perdesaan. Pada Agustus 2020, rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan di perkotaan selama sebulan sebesar 3.193.250 rupiah, turun sekitar 49 ribu rupiah bila dibanding Agustus 2019, sedangkan rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan di perdesaan sebesar 2.686.064 rupiah, turun 120 ribu rupiah dibanding Agustus 2019. Dengan penurunan tersebut, rata-rata upah/gaji bersih selama sebulan buruh/karyawan di daerah perdesaan makin jauh di bawah UMP.

Kebijakan pengaturan upah di Indonesia, yaitu melalui penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) hanya berlaku pada buruh, sementara upah

pekerja non-buruh tidak ada yang mengatur. Oleh karena itu, penawaran harga hanya terjadi antara pemberi dan penerima kerja. Pendapatan yang diperoleh pekerja non-buruh tergantung pekerjaan yang diterima. Bagi pekerja non-buruh khususnya pekerja bebas tidak akan memperoleh pendapatan jika mereka tidak masuk kerja baik karena izin, sakit atau penyebab lainnya. Namun demikian, seharusnya pekerja bebas juga mendapatkan hak-haknya atas tempat kerja yang aman, terbebas dari diskriminasi, izin karena hal-hal penting, dan kemungkinan agar dapat menjadi pekerja tetap. Data mengenai pendapatan pekerja non-buruh penting untuk disajikan, selain untuk memantau tingkat pendapatan pekerja non-buruh juga sebagai bahan masukan pemerintah untuk mengambil kebijakan terhadap pekerja non-buruh.

Gambar 4.5. Rata-Rata Pendapatan Bersih Selama Sebulan Pekerja Berusaha Sendiri* Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (ribu rupiah), 2020



Sumber : Publikasi Statistik Pendapatan Agustus 2020, BPS

Catatan:

*) Pekerja berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar.

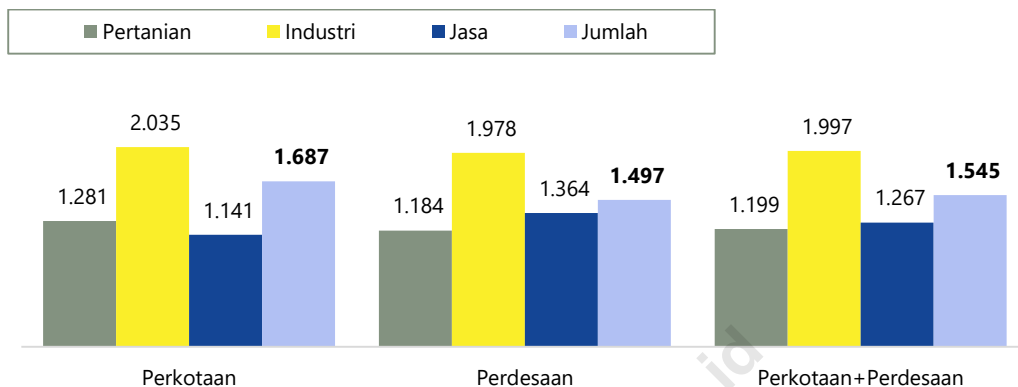
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, maka pendapatan bersih yang diterima oleh pekerja yang berusaha sendiri juga semakin besar. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, baik perkotaan maupun perdesaan sama-sama memperoleh pendapatan tertinggi pada pekerja dengan pendidikan SMA ke atas. Rata-rata pendapatan bersih pekerja lulusan SMA ke atas adalah sebesar 2,53 juta rupiah, sedangkan rata-rata pendapatan bersih pekerja berpendidikan tidak/belum tamat SD hanya sebesar 1,31 juta rupiah.

Secara total, rata-rata pendapatan bersih yang diterima pekerja yang berusaha sendiri di Kalimantan Tengah selama sebulan adalah sebesar 1,96 juta rupiah. Pekerja di daerah perkotaan memperoleh pendapatan yang lebih besar dibanding pekerja yang berusaha

sendiri di daerah perdesaan, masing-masing sebesar 2,50 juta rupiah dan 1,64 juta rupiah.

Menurut lapangan pekerjaan utama, rata-rata pendapatan bersih selama sebulan pekerja bebas yang bekerja pada lapangan usaha Industri merupakan yang tertinggi dibanding lapangan usaha lainnya yaitu sebesar hampir 2 juta rupiah. Yang termasuk lapangan usaha Industri di sini adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas, dan Air, serta Bangunan. Begitu juga jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, baik perkotaan maupun perdesaan pekerja bebas sama-sama memperoleh pendapatan tertinggi pada lapangan usaha Industri. Kemudian untuk rata-rata pendapatan bersih terendah adalah sebesar 1,2 juta rupiah, yang diperoleh oleh pekerja bebas yang bekerja pada lapangan usaha pertanian.

Gambar 4.6. Rata-Rata Pendapatan Bersih Selama Sebulan Pekerja Bebas* Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Lapangan Pekerjaan Utama (ribu rupiah), 2020



Sumber : Publikasi Statistik Pendapatan Agustus 2020, BPS

Catatan:

- *) Pekerja bebas adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan) dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.
- **Pertanian** terdiri atas sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan.
- **Industri** terdiri atas sektor pertambangan Pertambangan dan Pengalihan, Industri Pengolahan, Listrik, Gas, dan Air, Bangunan.
- **Jasa** terdiri atas Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan atau Tanah, Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.

Pekerja Anak (Usia 10-17 Tahun)

Pekerja anak adalah anak usia 10-17 tahun yang bekerja. Anak dianggap bekerja jika mereka bekerja minimal satu jam berturut-turut dalam periode seminggu yang lalu, dan pekerjaan itu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan dalam bentuk uang maupun barang. Adanya fenomena pekerja anak tidak dapat dihindari. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak. Selain itu, faktor sosial budaya dan kurangnya pendidikan/ pengetahuan orang tua juga menjadi penyebab anak memasuki dunia kerja.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus Tahun 2020, di Provinsi Kalimantan

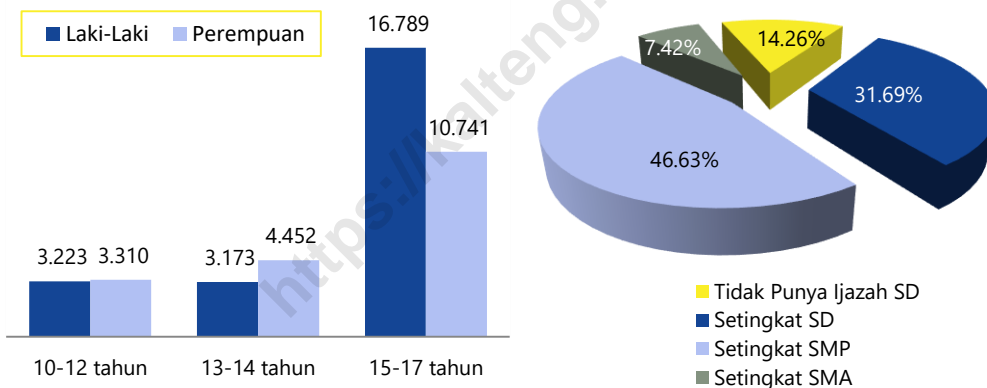
Tengah terdapat sekitar 42 ribu anak usia 10-17 tahun yang bekerja atau sebanyak 11,46 persen dari total penduduk usia 10-17 tahun. Dari 42 ribu anak yang bekerja tersebut, lebih dari separuhnya (62,92 persen) tinggal di daerah perdesaan. Empat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah anak yang bekerja paling tinggi yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur 8.832 anak, Kabupaten Kapuas 4.888 anak, Kabupaten Kotawaringin Barat 4.520 anak, dan Kabupaten Gunung Mas 4.372 anak. Bila ditotal, lebih dari 54 persen pekerja anak ada di empat kabupaten tersebut. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) anak usia 10-17 tahun sebesar 12,61 persen. Artinya anak usia 10-17 tahun yang masuk dalam pasar tenaga kerja sebesar 12,61 persen.

Tabel 4.2. Penduduk Usia 10-17 Tahun Menurut Karakteristik, 2020

Karakteristik	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk usia 10-17 tahun	148.137	215.791	363.928
Angkatan kerja	17.124	28.748	45.890
~ Bekerja	15.456	26.232	41.688
~ Pengangguran	1.686	2.516	4.202
Bukan Angkatan kerja	130.995	187.043	318.038
~ Sekolah	115.592	161520	277.112
~ Mengurus RT	7.593	12.511	20.104
~ Lainnya	7.810	13.012	20.822

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020, BPS

Gambar 4.7. Jumlah Anak Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin serta Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, 2020



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020, BPS

Dilihat dari jenis kelaminnya, anak laki-laki yang bekerja lebih banyak jika dibandingkan anak perempuan, yaitu sebesar 55,62 persen atau 23.185 anak. Sedangkan jika dilihat kelompok umur, anak pada usia 15-17 tahun paling banyak yang terjun ke dunia kerja, yakni sebesar 66,04 persen atau 27.530 anak. Untuk usia 10-12 tahun dan 13-14 tahun, jumlah anak perempuan yang bekerja ternyata lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak laki-laki yang bekerja.

Dilihat dari karakteristik pendidikan anak, sebagian besar anak usia 10-17 tahun yang bekerja memiliki pendidikan setingkat SMP, yaitu sebanyak 22.532 anak atau 46,63 persen. Sementara itu, mayoritas anak yang bekerja tahun 2020 diserap di sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi (52,76 persen). Sektor berikutnya yang paling banyak menyerap anak bekerja adalah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebesar 28,42 persen.

Tabel 4.3. Persentase Anak yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2020

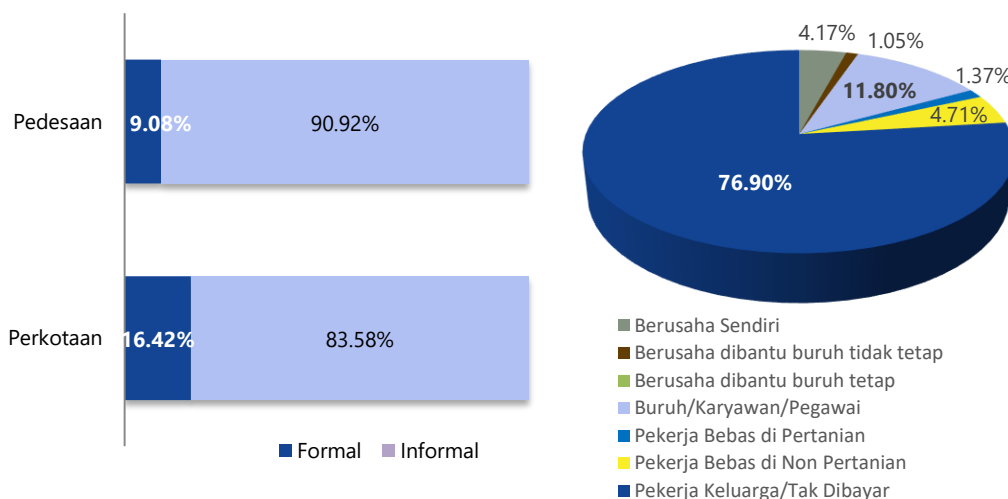
Lapangan Usaha	Banyak Anak yang Bekerja (Orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (Sektor 1)	11.849	28,42
Pertambangan dan Penggalian (Sektor 2)	3.099	7,43
Industri (Sektor 3)	2.368	5,68
Listrik, Gas dan Air Minum (Sektor 4)	63	0,15
Konstruksi/Bangunan (Sektor 5)	475	1,14
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi (Sektor 6)	21.994	52,76
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi (Sektor 7)	921	2,21
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan (Sektor 8)	660	1,58
Jasa kemasayarakatan, sosial, dan perorangan (Sektor 9)	259	0,62
Total	41.688	100,00

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020, BPS

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa anak-anak umumnya bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar dan bekerja di sektor informal. Ada sebanyak 76,90 persen anak yang berstatus sebagai pekerja keluarga/tak dibayar, artinya di antara 100 anak yang bekerja terdapat sekitar 77 anak yang status pekerjaannya

sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar. Penduduk dikategorikan bekerja pada kegiatan formal jika status pekerjaan mereka sebagai buruh/karyawan atau berstatus berusaha dibantu buruh/karyawan. Di luar status itu, maka penduduk dikategorikan bekerja pada kegiatan informal.

Gambar 4.8. Persentase Anak Usia 10 - 17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal, 2020



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020, BPS

Pandemi COVID-19

Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 16 Maret 2020. Sementara itu, kasus pertama Covid-19 di Kalimantan Tengah diumumkan tanggal 20 maret 2020. Terhitung sejak tanggal 3 Juli 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah termasuk Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai upaya untuk menekan persebaran virus corona yang semakin meluas.

Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih melambat sampai triwulan III tahun 2021 bila dibanding kondisi sebelum pandemi (Pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 6,12 persen, 2020 sebesar -1,40 persen, dan pertumbuhan c-to-c triwulan III 2021 sebesar 1,92 persen). Perlambatan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Terdampak Covid-19 (ribu orang), Agustus 2021

Komponen	Agustus 2021					Agustus 2020
	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengangguran Karena Covid-19	4,06	2,16	2,70	3,51	6,21	9,33
BAK Karena Covid-19	0,57	2,21	1,61	1,17	2,78	6,23
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	7,44	6,53	8,28	5,69	13,97	10,76
Penduduk dengan Jam Kerja Lebih Pendek Karena Covid-19	75,69	52,89	76,77	51,80	128,57	164,00
Total	87,75	63,78	89,37	62,17	151,54	190,31
Penduduk usia Kerja (PUK)	1.073,14	980,74	861,48	1.192,40	2.053,88	2.019,52
Persentase terhadap PUK	8,18	6,50	10,37	5,21	7,38	9,42

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021, BPS

Catatan:

*) Pengangguran karena COVID-19 adalah penganggur yang pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020;

**) Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena COVID-19 sejak Februari 2020;

***) Sementara Tidak Bekerja karena COVID-19 adalah penduduk bekerja namun karena COVID-19 menjadi sementara tidak bekerja.

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu:

- Pengangguran Karena Covid-19;
- Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19;

- Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19; dan
- Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19.

Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.

Pada Agustus 2021, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 151,54 ribu orang, turun sebanyak 38,78 ribu orang (20,37 persen) dibandingkan Agustus 2020. Dari empat komponen tersebut hanya komponen Sementara tidak bekerja karena Covid-19 yang mengalami peningkatan dibanding Agustus 2020, yaitu bertambah sebanyak 3,21 ribu orang. Tiga komponen lainnya mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar terjadi pada

komponen Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19 sebesar 55,34 persen atau sebanyak 3,45 ribu orang.

Berkurangnya jam kerja adalah dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja. Jumlah penganggur karena dampak Covid-19 sebanyak 6.213 orang atau sekitar 9,73 persen terhadap total penganggur (63,87 ribu orang) di Kalimantan Tengah pada Agustus 2021. Secara umum pada semua kategori tersebut, jumlah laki-laki yang terdampak lebih banyak dibandingkan perempuan. Begitu juga jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di daerah perkotaan lebih banyak terdampak Covid-19 dibandingkan dengan di perdesaan.

BAB 5

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Rata-rata Pengeluaran per Bulan
untuk Konsumsi **Makanan**
Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021

713.145
rupiah

682.681
rupiah

Rata-rata Pengeluaran per Bulan
untuk Konsumsi **Non Makanan**
Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021



5 TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pengeluaran Rumah Tangga

Berdasarkan hasil Susenas, rata-rata pengeluaran per kapita Kalimantan Tengah selama sebulan tahun 2021 hampir 1,40 juta rupiah. Nilai tersebut meningkat 4,69 persen dibanding tahun 2020 yang sebesar 1,33 juta rupiah. Hal ini berarti, jika dalam satu rumah tangga terdapat 4 anggota rumah tangga maka rata-rata pengeluaran per bulan rumah tangga tersebut sekitar 5,58 juta rupiah.

Seiring berubahnya kebutuhan masyarakat, komposisi pengeluaran turut mengalami perubahan. Selama tiga tahun terakhir, lebih dari 50 persen pengeluaran penduduk digunakan untuk konsumsi makanan. Persentase pengeluaran makan tersebut cenderung meningkat. Pada tahun 2021, persentase pengeluaran makanan naik 0,39 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya persentase pengeluaran per kapita non makanan

cenderung menurun.

Menurunnya proporsi pengeluaran non makanan dapat mengindikasikan adanya penurunan kesejahteraan masyarakat. Jika ditinjau lebih rinci, pengeluaran non makanan tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan perumahan seperti bahan bakar, listrik, internet, dan pulsa. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pada masyarakat sejahtera, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa umumnya merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran barang dan jasa dimaksud antara lain untuk perawatan kesehatan, perawatan kecantikan, peningkatan pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sebagainya, dimana pengeluaran tersebut tidak bersifat primer lagi.

Tabel 5.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kalimantan Tengah, 2019-2021

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan					
	Nominal (Rp)			Persentase		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan	650.759	675.948	713.145	50,56	50,70	51,09
Non makanan	636.442	657.370	682.681	49,44	49,30	48,91
Perumahan	347.001	356.364	372.721	26,96	26,73	26,70
Barang dan Jasa	134.855	141.289	141.885	10,48	10,60	10,17
Pakaian	31.294	32.126	30.485	2,43	2,41	2,18
Barang Tahan Lama	65.747	58.487	68.611	5,11	4,39	4,92
Lainnya	57.544	69.104	68.980	4,47	5,18	4,94

Sumber : Susenas Maret 2019-2021, BPS

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak, dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan penduduk digunakan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia¹, yaitu dengan melihat persentase pengeluaran yang mampu dibelanjakan oleh kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah, 40

persen penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Disamping kriteria yang ditetapkan Bank Dunia ada indikator lain yang juga sering digunakan yaitu Indeks Gini².

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kalimantan Tengah tahun 2021 cenderung turun dibanding tahun 2020. Hal tersebut tampak dari meningkatnya porsi pengeluaran kelompok 40 persen terendah yaitu sebesar 0,08 poin dibanding tahun 2020. Sementara itu, porsi pendapatan di kelompok 20 persen tertinggi masih mendominasi dengan proporsi sebesar 40,82 persen atau turun sebesar 0,61 poin dibanding tahun 2020. Sejalan dengan kriteria Bank Dunia, Indeks Gini Kalimantan Tengah menunjukkan penurunan ketimpangan pendapatan. Selama periode 2018-2021, Nilai Indeks Gini cenderung turun dari 0,342 hingga menjadi 0,323.

Tabel 5.2. Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita¹ dan Indeks Gini² di Kalimantan Tengah, 2018-2021

Tahun	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi	Indeks Gini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	19,48	38,40	42,12	0,342
2019	19,81	38,58	41,62	0,336
2020	20,44	38,13	41,43	0,329
2021	20,52	38,66	40,82	0,323

Sumber : Susenas Maret 2018-2021, BPS

Catatan:

¹ Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut :

- memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi,
- memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang,
- memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

² Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi.

Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi

XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein per hari.

Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari penduduk Kalimantan Tengah tahun 2021 sebesar 2.194,45 kkal. Ini berarti konsumsi kalori per hari tiap penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sudah mencukupi gizi yang ditentukan (2.150 kkal). Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita per hari penduduk Kalimantan Tengah menunjukkan penduduk provinsi ini sudah memiliki kecukupan protein karena jumlah konsumsi proteinnya lebih tinggi dari jumlah protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (57 gram protein per hari).

Tabel 5.3. Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari di Kalimantan Tengah, 2019-2021

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Energi (kkal)			
2019	2.107,00	2.176,89	2.148,80
2020	2.048,47	2.203,75	2.141,22
2021	2.132,74	2.237,96	2.194,45
Protein (gram)			
2019	65,39	61,94	63,33
2020	63,59	62,09	62,69
2021	65,26	63,03	63,95

Sumber : Susenas Maret 2019-2021, BPS

Ditinjau dari daerah tempat tinggal, rata-rata konsumsi kalori penduduk perkotaan selama kurun waktu 2019-2021 masih belum memenuhi kriteria kecukupan gizi (2.150 kkal). Hal ini berbeda dengan penduduk perdesaan yang rata-rata mampu mengonsumsi

hingga 2.237,96 kkal per kapita per hari. Sementara itu, konsumsi protein penduduk di perkotaan dan perdesaan selama kurun waktu 2019-2021 sama-sama memenuhi kecukupan gizi. Penduduk perdesaan rata-rata mengonsumsi protein sebanyak 63,03

gram per hari. Sementara penduduk perkotaan mengonsumsi protein sebanyak 65,26 gram per hari. Kondisi ini menunjukkan, penduduk perkotaan lebih memilih mengonsumsi protein lebih banyak dibandingkan karbohidrat.

Karbohidrat sebagai penghasil energi dipercaya menjadi penyebab utama dari kenaikan berat badan. Sementara itu, makanan berprotein tinggi dapat

menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama karena dipecah lebih lama dalam sistem pencernaan, tidak seperti karbohidrat. Protein juga dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil sehingga dapat menghindari rasa lapar yang berlebihan. Kekurangannya, tubuh membutuhkan waktu yang lebih lama dan harus bekerja lebih keras untuk mengolah protein menjadi energi daripada saat mengolah karbohidrat.

<https://kalteng.bps.go.id>

BAB 6

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN



98,74
persen

Sumber
Penerangan
Listrik

Atap Beton,
Genteng,
Sirap, Seng,
dan Asbes

99,34
persen



70,07
persen

Sumber
Air Minum
Bersih

Dinding
Terluas
Tembok
dan Kayu

98,78
persen



6 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan rumah layak huni harus memenuhi beberapa kriteria kualitas, antara lain memiliki dinding terluas terbuat dari tembok atau kayu, beratapkan beton, genteng, sirap, seng, maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Pada umumnya, di Kalimantan Tengah sangat sedikit rumah yang berlantaikan tanah. Pada tahun 2019-2021, hanya kurang dari satu persen rumah yang masih berlantaikan tanah. Untuk atap dan dinding, sekitar 99 persen rumah tinggal di Kalimantan Tengah sudah beratapkan beton, genteng, sirap, seng, atau asbes dan juga sudah memiliki dinding terluas terbuat dari tembok atau kayu.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana

Sehat (RS Sehat) dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja duduk, mandi, kakus, cuci, dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m² (BPS, 2016).

Rata-rata luas lantai per kapita di Kalimantan Tengah sudah jauh melebihi kriteria yang disyaratkan WHO. Secara umum, rata-rata luas lantai per kapita yaitu 22,35 m². Artinya, jika terdapat sebanyak empat orang anggota rumah tangga, luas rumah diperkirakan sekitar 89 m².

Tabel 6.1. Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kalimantan Tengah, 2019-2021

Indikator Kualitas Perumahan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai Bukan Tanah (%)	99,54	99,46	99,55
Atap Beton, Genteng, Sirap, Seng, dan Asbes (%)	99,02	99,41	99,34
Dinding terluas tembok dan kayu (%)	98,72	99,34	98,78
Rata-rata luas lantai per kapita (m ²)	21,77	22,82	22,35

Sumber : Susenas Maret 2019-2021, BPS

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal, seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak, merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2021, hampir dua per tiga rumah tangga di Kalimantan Tengah sudah memiliki akses terhadap air minum bersih. Lebih dari separuh rumah tangga di Kalimantan Tengah bahkan sudah menjadikan air kemasan, air isi ulang, dan leding sebagai sumber air minum utama.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting perannya. Ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan

mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Hal itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan, pembuangan kotoran manusia harus dikelola sesuai ketentuan jamban sehat. Fasilitas yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu tersedianya jamban sendiri yang dilengkapi dengan tangki septik.

Sekitar 85 persen rumah tangga di Kalimantan Tengah memiliki jamban sendiri. Hal ini menunjukkan masyarakat mulai menyadari kebutuhan akan jamban merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Disamping telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2021, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik mencapai 67 persen, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya.

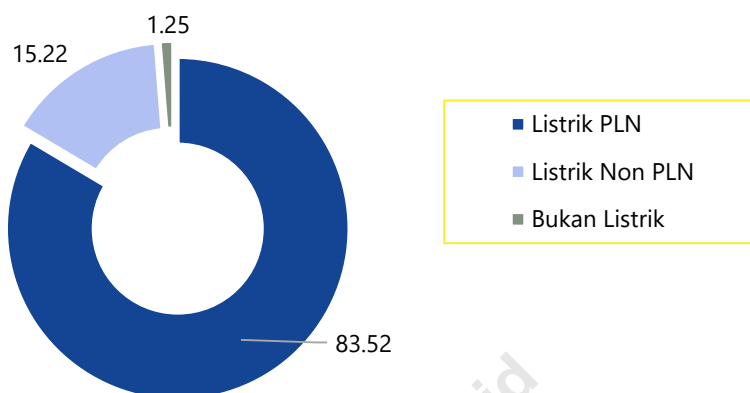
Tabel 6.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kalimantan Tengah, 2019-2021

Fasilitas Perumahan	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan, air isi ulang & leding	53,25	54,91	52,65
Air minum bersih ¹⁾	69,18	71,14	70,07
Jamban Sendiri	78,02	78,78	84,60
Jamban Sendiri dengan tangki septik	65,84	68,83	66,73
Sumber penerangan listrik	97,90	98,32	98,75

Catatan : ¹⁾Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (*septic tank*) > 10 meter.

Sumber : Susenas Maret 2019-2021, BPS

Gambar 6.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kalimantan Tengah, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021, BPS

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur, persentase rumah tangga yang dapat menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2021, lebih dari 98 persen rumah tangga di Kalimantan Tengah telah menikmati fasilitas penerangan listrik, artinya masih tersisa kurang dari dua persen rumah tangga yang belum bisa menikmati fasilitas penerangan listrik.

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan

rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini meliputi rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara, atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Pada tahun 2021, lebih dari seperempat rumah tangga di Kalimantan Tengah telah menempati rumah milik sendiri. Bila dirinci, persentase rumah tangga yang mengontrak/menyewa rumah untuk tempat tinggal menurun dibanding tahun sebelumnya. Begitu pula persentase rumah tangga yang menempati rumah bebas sewa, seperti rumah milik orang tua/saudara. Sedangkan persentase rumah tangga yang menempati rumah dinas meningkat dibanding tahun 2020.

Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kalimantan Tengah, 2019-2021

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik Sendiri	75,58	78,35	77,04
Kontrak/Sewa	8,47	7,57	7,22
Bebas Sewa	9,51	8,60	8,36
Rumah Dinas dan Lainnya	6,44	5,48	7,38

Sumber : Susenas Maret 2019-2021, BPS

<https://kalteng.bps.go.id>

BAB 7

KEMISKINAN



Garis Kemiskinan
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021

506.982
rupiah

Indeks Kedalaman Kemiskinan
Indeks Keparahan Kemiskinan

0,712
0,152

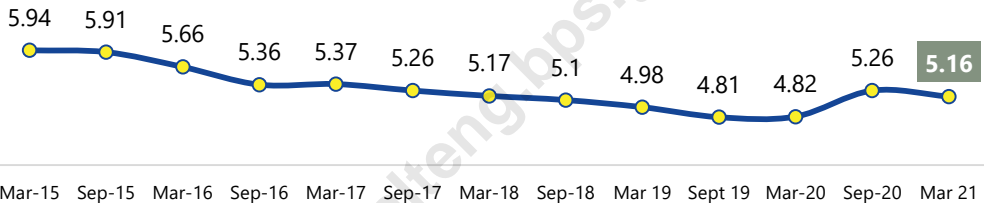
7 KEMISKINAN

Perkembangan Penduduk Miskin di Kalimantan Tengah

Dari tahun ke tahun, persentase penduduk miskin di Kalimantan Tengah cenderung menurun. Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 147,7 ribu jiwa atau 5,94

persen dari jumlah seluruh penduduk Kalimantan Tengah. Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah terus berupaya menekan angka kemiskinan, sehingga pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin Kalimantan Tengah berkurang sekitar 8 ribu jiwa dibanding Maret 2015.

Gambar 7.1. Perkembangan Penduduk Miskin di Kalimantan Tengah, Maret 2015- Maret 2021



Sumber : Susenas 2015-2021, BPS

Tabel 7.1. Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal di Kalimantan Tengah, Maret 2015- Maret 2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mar-15	41.323	106.377	147.700	4,86	6,50	5,94
Sept-15	48.723	99.406	148.129	5,68	6,02	5,91
Mar-16	41.069	102.416	143.485	4,60	6,23	5,66
Sept-16	40.615	96.848	137.463	4,49	5,83	5,36
Mar-17	42.845	96.316	139.161	4,59	5,81	5,37
Sept-17	48.337	89.547	137.884	5,01	5,41	5,26
Mar-18	47.977	88.951	136.928	4,70	5,47	5,17
Sept-18	48.127	88.319	136.446	4,56	5,45	5,10
Mar-19	48.558	86.036	134.594	4,47	5,33	4,98
Sept-19	47.001	84.240	131.242	4,28	5,17	4,81
Mar-20	51.276	81.661	132.937	4,62	4,96	4,82
Sept-20	54.337	87.446	141.783	4,92	5,50	5,26
Mar-21	54.464	85.581	140.045	4,86	5,38	5,16

Sumber : Susenas 2015-2021, BPS

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi dan lebih banyak ditemukan di daerah perdesaan. Menurut daerah tempat tinggal, penduduk miskin di daerah perdesaan hampir dua kali lebih banyak dibandingkan di daerah perkotaan. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan mencapai 85 ribu jiwa (5,38 persen). Jumlah tersebut bertambah sebanyak 3.920 jiwa dibanding Maret 2020. Begitu pula jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebanyak 3.188 jiwa. Sampai dengan Maret 2021 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mencapai 54 ribu jiwa (4,86 persen).

Perkembangan Penduduk Miskin di Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota

Di samping melihat secara keseluruhan, penting juga untuk melihat sebaran penduduk miskin menurut kabupaten/kota. Dari segi jumlah, penduduk miskin masih terpusat di kabupaten yang besar dan luas seperti Kabupaten Kotawaringin Timur (27 ribu jiwa) dan Kabupaten Kapuas (19 ribu jiwa). Sementara itu, secara proporsi Kabupaten Seruyan dan Barito Timur masih merupakan kabupaten dengan proporsi penduduk miskin tertinggi di Kalimantan Tengah yaitu sebesar 7,22 persen dan 6,38 persen pada tahun 2021.

Tabel 7.2. Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2018-2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)				Persentase Penduduk Miskin (P ₀)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kotawaringin Barat	12,90	12,76	11,46	12,29	4,27	4,11	3,59	3,95
Kotawaringin Timur	28,20	27,38	26,64	27,06	6,21	5,90	5,62	5,91
Kapuas	18,52	18,23	18,17	19,45	5,20	5,09	5,04	5,35
Barito Selatan	6,16	5,99	6,12	6,42	4,55	4,39	4,45	4,62
Barito Utara	6,50	6,46	6,78	7,40	5,00	4,95	5,17	5,61
Sukamara	1,96	2,01	2,13	2,38	3,19	3,16	3,23	3,66
Lamandau	2,52	2,47	2,61	2,92	3,15	3,01	3,09	3,56
Seruyan	14,56	14,66	14,53	15,07	7,43	7,19	6,85	7,22
Katingan	8,73	8,51	8,23	9,15	5,22	5,02	4,79	5,25
Pulang Pisau	5,71	5,39	5,21	5,43	4,51	4,24	4,09	4,24
Gunung Mas	5,96	5,86	5,78	6,30	5,10	4,91	4,75	5,35
Barito Timur	8,05	7,97	7,88	8,02	6,56	6,32	6,09	6,38
Murung Raya	7,39	7,21	7,18	7,31	6,28	6,00	5,85	6,15
Palangka Raya	9,78	9,69	10,23	10,86	3,47	3,35	3,44	3,75
Kalimantan Tengah	136,93	134,59	132,94	140,04	5,17	4,98	4,82	5,16

Sumber : Susenas Maret 2018-2021, BPS

Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁), Indeks Keperahan Kemiskinan (P₂)

Garis Kemiskinan (GK) sebagai ukuran yang digunakan BPS untuk menentukan seseorang tergolong miskin atau tidak. GK dibentuk dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GK senantiasa mengalami peningkatan setiap tahun mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2021, GK Kalimantan Tengah sekitar 507 ribu rupiah per kapita per bulan atau sekitar enam juta rupiah per orang per tahun.

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, pada tahun 2021 garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih rendah sebanyak 21 ribu rupiah

dibanding daerah perdesaan. GK di perkotaan pada tahun 2021 sekitar 494 ribu rupiah, sedangkan di daerah perdesaan hampir 515 ribu rupiah. Hal ini dimungkinkan terjadi karena harga barang di perdesaan lebih tinggi. Harga barang yang diimpor dari kota atau luar daerah menyebabkan harganya akan jauh lebih mahal. Terlebih lagi, tantangan distribusi barang dikarenakan kondisi geografis Kalimantan Tengah yang luas, sehingga ada wilayah yang sulit dijangkau.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan tentang program kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 7.3. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keperahan Kemiskinan di Kalimantan Tengah, 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	427.494	457.412	485.635	506.982
Perkotaan	403.547	443.674	471.684	494.153
Perdesaan	440.649	464.931	492.603	514.743
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)	0,808	0,698	0,803	0,712
Perkotaan	0,878	0,713	0,819	0,686
Perdesaan	0,764	0,688	0,792	0,731
Indeks Keperahan Kemiskinan (P₂)	0,213	0,140	0,199	0,152
Perkotaan	0,265	0,150	0,199	0,148
Perdesaan	0,181	0,134	0,199	0,155

Sumber : Susenas Maret 2018-2021, BPS

Indeks kedalaman kemiskinan (P₁) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan

pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2021 nilai P_1 menurun, yang menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, P_1 di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Hal ini mencerminkan, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan.

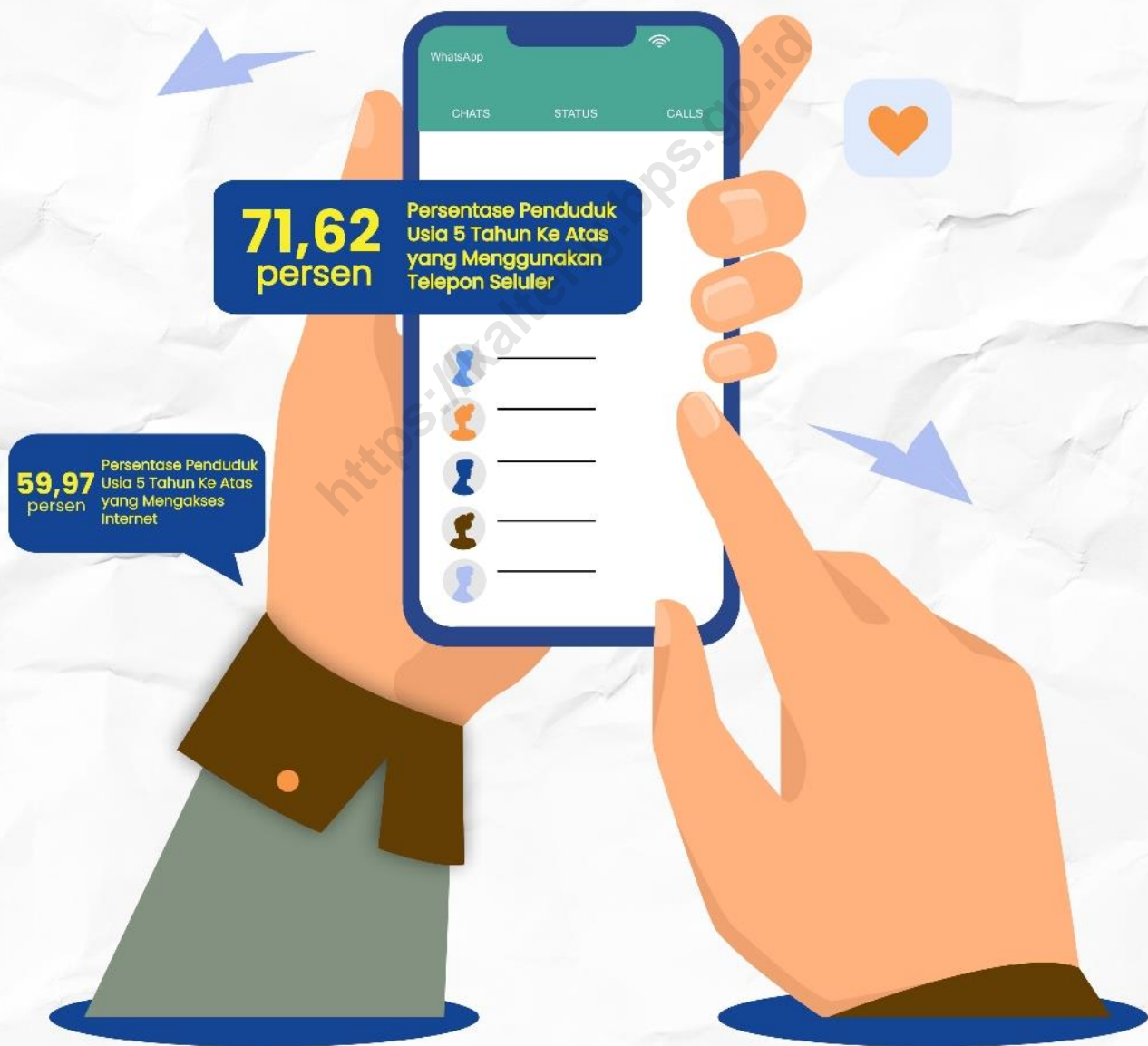
Sementara itu, Indeks keparahan kemiskinan (P_2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. P_2 pada tahun 2021 relatif lebih rendah dibanding tahun

2020 baik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan. Nilai P_2 yang menurun berarti kemiskinan di daerah perkotaan dan di daerah perdesaan tidak semakin parah. Nilai P_2 di daerah perdesaan yang lebih besar dari daerah perkotaan artinya ketimpangan kemiskinan di daerah perdesaan lebih lebar dari daerah perkotaan.

Baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan, namun nilai P_1 dan P_2 di daerah perkotaan dan perdesaan menurun pada tahun 2021. Hal ini menggambarkan, kemiskinan yang terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan tidak semakin dalam dan juga tidak semakin parah.

BAB 8

SOSIAL LAINNYA



8 SOSIAL LAINNYA

Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator lain yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat adalah akses pada teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkau harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan. Kepemilikan dan akses terhadap media informasi juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang.

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada

kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler dengan beragam kemudahan yang ditawarkan membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunanya.

Berdasarkan hasil Susenas, jumlah rumah tangga yang masih menggunakan telepon rumah pada tahun 2021 hanya sekitar 0,41 persen, menurun dibanding tahun 2020. Sementara rumah tangga yang memiliki komputer/laptop pada tahun 2021 masih sekitar 29 persen. Keberadaan komputer/laptop sebagai penunjang baik dalam kegiatan bekerja maupun belajar menjadikannya kebutuhan yang harus dimiliki setiap rumah tangga.

Tabel 8.1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon dan Komputer/Laptop di Kalimantan Tengah, 2018-2021

Alat Komunikasi	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Telepon	0,95	0,58	0,53	0,41
Komputer	22,17	21,52	20,42	29,41

Sumber: Susenas Maret 2018-2021, BPS

Tabel 8.2. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Mempunyai Akses Terhadap Telepon Seluler dan Akses Internet di Kalimantan Tengah, 2018-2021 ¹⁾

Alat Komunikasi	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Telepon Seluler	68,20	70,28	68,56	71,62
Internet	36,17	46,73	51,18	59,97

Sumber: Susenas Maret 2018-2021, BPS

Catatan: ¹⁾ menggunakan referensi waktu 3 bulan terakhir

Masyarakat kini cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Selama 2018-2021, penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki atau menguasai telepon seluler/nirkabel hampir mencapai 72 persen.

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki telepon seluler berdasarkan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah cukup beragam. Pada tahun 2021, Kota Palangka Raya memiliki persentase tertinggi yaitu mencapai 86,87 persen, diikuti oleh Kabupaten Kotawaringin Barat (74,75 persen), dan Kabupaten Lamandau (74,14 persen). Sedangkan persentase pengguna telepon seluler terendah terdapat di Kabupaten Kapuas yang hanya sebesar 62,99 persen.

Media internet digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif, dan

menarik. Pengguna internet dapat mendapatkan informasi yang diinginkan dengan lebih cepat. Bahkan fenomena sekarang melalui internet, banyak orang dapat menghasilkan uang. Sebut saja beberapa kegiatan lewat media *online*, *online shop*, youtube, jual beli saham/mata uang/emas, kredit *online*, *dropship*, *blogging*, *google adsense*.

Secara umum terjadi peningkatan persentase penduduk yang berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet cukup signifikan, yaitu dari 36,17 persen pada tahun 2018 menjadi 59,97 persen pada tahun 2021. Jika ditinjau berdasarkan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya memiliki pengguna internet terbanyak. Dari hasil susenas 2021, sebanyak 83,49 persen penduduk Kota Palangka Raya usia 5 tahun ke atas sudah mempunyai akses terhadap internet. Hal ini dinilai wajar mengingat Palangka Raya merupakan pusat perekonomian di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kabupaten Kapuas tercatat sebagai kabupaten dengan persentase pengakses internet terendah sebesar 43,32 persen.

Akses Terhadap Bantuan Sosial

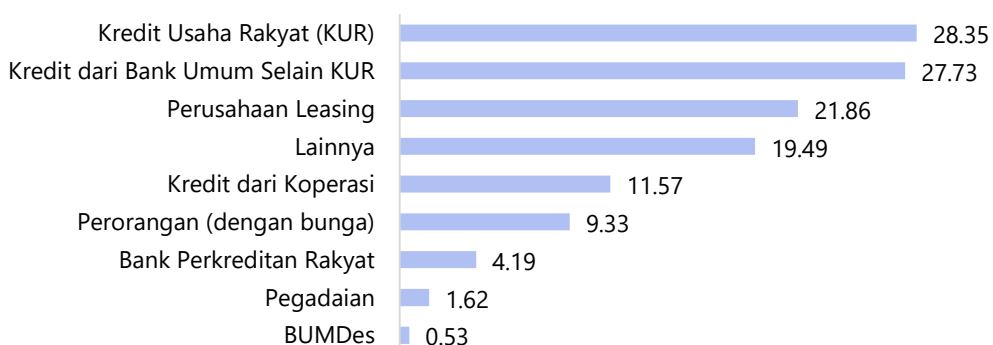
Sampai saat ini, pemerintah masih terus mengupayakan berbagai program yang sasarannya adalah golongan masyarakat berpendapat rendah, sehingga kesejahteraan bersama dapat dicapai. Salah satu program adalah pemberian kredit usaha. Bentuk-bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan mendukung peningkatan pendapatan, produktivitas, dan penyediaan lapangan kerja.

Beberapa contoh program pemberian kredit usaha dari pemerintah diantaranya KUBE/KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang merupakan program pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial, KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang disalurkan oleh beberapa bank terpilih dan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang terdiri

dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Wilayah Khusus, dan Desa Tertinggal. Jenis program penyaluran yang lain seperti program koperasi, kredit dari BPR (Bank Perkreditan Rakyat), dari perusahaan leasing, dari pegadaian, dan dari badan usaha milik desa (BUMDes).

Dilihat dari jenis kredit usaha yang diterima, persentase rumah tangga penerima kredit usaha tahun 2021 tertinggi berasal dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu mencapai 28,35 persen dan terendah berasal dari BUMDes sebesar 0,53 persen. Sementara itu, jika dilihat menurut kabupaten/kota pada tahun 2021, Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi kabupaten dengan persentase rumah tangga penerima kredit usaha terbanyak sekitar 26,34 persen, diikuti Kota Palangka Raya (26,18 persen), dan Kabupaten Sukamara (25,05 persen). Sementara itu, Kabupaten Murung Raya tercatat sebagai kabupaten dengan persentase penerima kredit terendah sebesar 6,75 persen.

Gambar 8.1. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir di Kalimantan Tengah, 2021



Sumber : Susenas Maret 2021, BPS

Catatan : Rumah Tangga penerima kredit usaha bisa menerima lebih dari satu kredit

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-12 tahun) yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin (peserta Kartu Keluarga Sejahtera), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

PIP merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari

kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Secara umum, rumah tangga yang menerima PIP menurun di 2021. Rumah tangga yang menerima PIP hanya sebesar 3,66 persen, menurun 0,87 poin dibanding 2020. Berdasarkan wilayah, Kabupaten Kapuas tercatat sebagai kabupaten dengan persentase penerima PIP tertinggi yaitu sebesar 7,60 persen. Sementara terendah tercatat di Kabupaten Katingan sebesar 1,15 persen.

Tabel 8.3. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2019-2021

Alat Komunikasi	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Indonesia Pintar (PIP)	4,64	4,53	3,66
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	4,78	6,08	4,55

Sumber: Susenas Maret 2019-2021, BPS

Bantuan sosial lainnya yang sudah diluncurkan pemerintah adalah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau diperbaharui menjadi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penerima KPS/KKS bantuan bisa melakukan kegiatan tarik tunai, menabung, mengambil uang bansos Program Keluarga Harapan (PKH) maupun menebus Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan bentuk bantuan yang sejalan dengan inovasi teknologi 4.0, bantuan pemerintah diharapkan lebih tepat waktu, tepat kualitas, tepat

administrasi, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat harga.

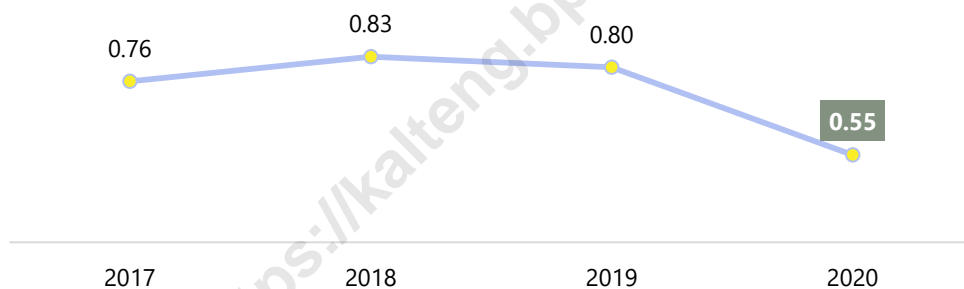
Rumah tangga yang menerima KPS/KKS mengalami penurunan di 2021 yaitu sebesar 4,55 persen dari sebelumnya 6,08 persen di 2020. Berdasarkan wilayah, Kabupaten Kotawaringin Timur juga tercatat sebagai kabupaten dengan persentase penerima KPS/KKS tertinggi yaitu sebesar 7,15 persen. Sementara terendah tercatat di kabupaten Seruyan yaitu sebesar 2,10 persen.

Tindak Kejahatan

Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut. Tingginya persentase korban tindak kejahatan mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan

mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Penduduk yang termasuk dalam korban kejahatan yang dicakup dalam Susenas 2021 ini adalah semua bentuk korban kejahatan selama periode 1 Januari – 31 Desember 2020, kecuali kejahatan kasus pembunuhan karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota rumah tangga lagi. Selama tahun 2020 persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan menurun dibanding tahun 2019 menjadi 0,55 persen.

Gambar 8.2. Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Kalimantan Tengah, 2017-2020



Sumber: Susenas Maret 2018-2021, BPS

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas RI. (2020, Oktober 13). *BappenasRI on Twitter*. Diambil kembali dari <https://twitter.com/bappenasri/status/1315832955474907137>
- BKKBN. (2017, Maret 6). *Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun*. Diambil kembali dari BKKBN: <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>
- BPS. (2011). *Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2019). *Indeks Kesejahteraan Rakyat 2019*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2020). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2020*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2020). *Statistik Pendapatan Agustus 2020*. Jakarta: BPS.
- BPS. (t.thn.). *Metadata Indikator*. Diambil kembali dari Sirusa: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/index>
- BPS Provinsi Kalimantan Tengah. (2018). *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2025 Menurut Hasil SUPAS 2015*. Palangka Raya: BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- BPS Provinsi Kalimantan Tengah. (2020). *Indeks Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah 2020*. Palangka Raya: BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- BPS Provinsi Kalimantan Tengah. (2021). *Berita Resmi Statistik*. Diambil kembali dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah: <https://kalteng.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1136/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--provinsi-kalimantan-tengah-sebesar-4-53-persen.html>
- BPS Provinsi Kalimantan Tengah. (2021). *Potret Tujuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 2020*. Palangka Raya: BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- BPS Provinsi Kalimantan Tengah. (2021). *Profil Anak yang Bekerja Provinsi Kalimantan Tengah 2020*. Palangka Raya: BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- BPS Provinsi Kalimantan Tengah. (2021). *Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2021*. Palangka Raya: BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kemnaker: Pelatihan Vokasi Jadi Kunci Peningkatan Kualitas SDM. (2019, September 24). Diambil kembali dari <https://www.suara.com/news/2019/09/24/150000/kemnaker-pelatihan-vokasi-jadi-kunci-peningkatan-kualitas-sdm>

Kompas.com. (2021, Oktober 26). *Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang.* Diambil kembali dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang?page=all#:~:text=Aturan%20tersebut%20tertuang%20dalam%20UU,u ntuk%20perempuan%20maupun%20laki%20Dlai>.

PDSPK - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (t.thn.). *Daftar Formula/Paramater.* Diambil kembali dari Sistem Verifikasi dan Validasi Proses Pembelajaran: <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/vervalpp/formula.php>

Seftiawan, D. (2017, September 14). *Sekolah Satu Atap Kurangi Kesenjangan, Fokus di Daerah Tertinggal.* Diambil kembali dari PikiranRakyat.com: <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01286012/sekolah-satu-atap-kurangi-kesenjangan-fokus-di-daerah-tertinggal-409393>

LAMPIRAN



Lampiran 1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2019-2021

Kabupaten/Kota	Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan Penduduk (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	301.563	307.079	312.509	1,90	1,83	1,77
Kotawaringin Timur	449.354	454.427	459.283	1,20	1,13	1,07
Kapuas	358.723	361.284	363.828	0,73	0,71	0,70
Barito Selatan	136.847	138.021	139.191	0,87	0,86	0,85
Barito Utara	130.631	131.381	132.122	0,59	0,57	0,56
Sukamara	62.024	63.686	65.353	2,75	2,68	2,62
Lamandau	79.647	80.973	82.273	1,74	1,66	1,61
Seruyan	198.356	204.275	210.246	3,06	2,98	2,92
Katingan	170.006	172.438	174.887	1,44	1,43	1,42
Pulang Pisau	127.175	127.704	128.223	0,43	0,42	0,41
Gunung Mas	115.567	116.772	117.920	1,11	1,04	0,98
Barito Timur	122.285	124.274	126.220	1,70	1,63	1,57
Murung Raya	116.529	117.868	119.152	1,22	1,15	1,09
Palangka Raya	281.096	286.070	290.961	1,84	1,77	1,71
Kalimantan Tengah	2.649.803	2.686.252	2.722.168	1,42	1,38	1,34

Sumber: Proyeksi Penduduk Kalimantan Tengah 2015-2025 Hasil SUPAS 2015, BPS

Lampiran 2. Persentase Luas Provinsi, Kepadatan Penduduk, dan Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2019-2021

Kabupaten/Kota	Persentase Luas Provinsi	Kepadatan Penduduk per Km ²			Persentase Penduduk		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kotawaringin Barat	7,01	28,03	28,54	29,05	11,38	11,43	11,48
Kotawaringin Timur	10,94	26,75	27,06	27,34	16,96	16,92	16,87
Kapuas	9,77	23,92	24,09	24,26	13,54	13,45	13,37
Barito Selatan	5,75	15,50	15,63	15,76	5,16	5,14	5,11
Barito Utara	5,40	15,74	15,83	15,92	4,93	4,89	4,85
Sukamara	2,49	16,21	16,64	17,08	2,34	2,37	2,40
Lamandau	4,18	12,42	12,62	12,83	3,01	3,01	3,02
Seruyan	10,68	12,09	12,45	12,82	7,49	7,60	7,72
Katingan	11,40	9,71	9,85	9,99	6,42	6,42	6,42
Pulang Pisau	5,86	14,14	14,19	14,25	4,80	4,75	4,71
Gunung Mas	7,04	10,70	10,81	10,91	4,36	4,35	4,33
Barito Timur	2,50	31,89	32,41	32,92	4,61	4,63	4,64
Murung Raya	15,43	4,92	4,97	5,03	4,40	4,39	4,38
Palangka Raya	1,56	117,15	119,22	121,26	10,61	10,65	10,69
Kalimantan Tengah	100,00	17,26	17,49	17,73	100,00	100,00	100,00

Sumber: Proyeksi Penduduk Kalimantan Tengah 2015-2025 Hasil SUPAS 2015, BPS

Lampiran 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2020-2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur					
	0-14 Tahun		15-64 Tahun		65+ Tahun	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	74.321	74.750	220.521	224.482	12.237	13.277
Kotawaringin Timur	114.357	114.283	323.383	327.026	16.687	17.974
Kapuas	88.895	88.346	253.659	255.396	18.730	20.086
Barito Selatan	34.678	34.511	96.491	97.314	6.852	7.366
Barito Utara	33.243	33.019	91.918	92.426	6.220	6.677
Sukamara	16.651	16.901	44.714	45.910	2.321	2.542
Lamandau	19.472	19.523	56.893	57.761	4.608	4.989
Seruyan	50.971	51.973	147.489	151.866	5.815	6.407
Katingan	44.927	45.024	119.386	121.077	8.125	8.786
Pulang Pisau	30.328	29.977	88.517	88.792	8.859	9.454
Gunung Mas	32.915	32.844	78.327	79.121	5.530	5.955
Barito Timur	31.086	31.138	85.580	86.863	7.608	8.219
Murung Raya	34.688	34.697	78.532	79.445	4.648	5.010
Palangka Raya	66.237	66.598	208.657	212.226	11.176	12.137
Kalimantan Tengah	672.769	673.584	1.894.067	1.919.705	119.416	128.879

Sumber: Proyeksi Penduduk Kalimantan Tengah 2015-2025 Hasil SUPAS 2015, BPS

Lampiran 4. Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Tidak Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional untuk Menunda atau Mencegah Kehamilan Menurut Alasan Utama Tidak Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional KB, 2021

Kabupaten/Kota	Alasan fertilitas	Tidak setuju KB	Tidak tahu alat/cara KB	Takut efek samping	Lain-nya	Tidak tahu	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kotawaringin Barat	34,25	4,66	0,00	12,39	46,65	2,05	100,00
Kotawaringin Timur	38,79	0,33	0,00	11,03	46,21	3,64	100,00
Kapuas	22,16	0,00	0,00	23,97	50,25	3,61	100,00
Barito Selatan	55,03	1,56	0,00	11,05	29,98	2,38	100,00
Barito Utara	38,61	3,73	0,00	13,60	40,62	3,45	100,00
Sukamara	42,84	0,00	0,00	7,53	48,05	1,59	100,00
Lamandau	30,08	0,83	0,00	16,97	45,71	6,40	100,00
Seruyan	24,27	1,29	0,00	19,83	48,58	6,03	100,00
Katingan	45,05	0,87	0,00	10,83	40,63	2,61	100,00
Pulang Pisau	40,73	0,53	0,00	4,94	49,35	4,45	100,00
Gunung Mas	33,82	0,00	0,35	8,32	54,41	3,09	100,00
Barito Timur	22,58	2,61	0,00	6,75	64,95	3,11	100,00
Murung Raya	24,14	1,22	0,00	6,61	62,08	5,96	100,00
Palangka Raya	23,27	0,90	0,00	17,85	52,21	5,77	100,00
Kalimantan Tengah	32,49	1,43	0,01	13,90	48,31	3,86	100,00

Sumber: Susenas Maret 2021, BPS

Lampiran 5. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah, Agustus 2021

Status Pekerjaan	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Berusaha sendiri	118.541	179.044	297.585	22,10
2 Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tida	64.094	116.877	180.971	13,44
3 Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar	20.174	18.946	39.120	2,91
4 Buruh/karyawan/pegawai	269.841	290.208	560.049	41,59
5 Pekerja bebas di pertanian	8.301	35.864	44.165	3,28
6 Pekerja bebas di nonpertanian	23.263	30.299	53.562	3,98
7 Pekerja keluarga/tidak dibayar	58.320	112.665	170.985	12,70
Total Penduduk Bekerja	562.534	783.903	1.346.437	100,00

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021, BPS

Lampiran 6. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah, Agustus 2021

Kabupaten/Kota	Perkotaan	Pedesaan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	2.035	2.485	4.520	10,84
Kotawaringin Timur	4.709	4.123	8.832	21,19
Kapuas	677	4.211	4.888	11,73
Barito Selatan	57	934	991	2,38
Barito Utara	886	2.050	2.936	7,04
Sukamara	145	285	430	1,03
Lamandau	85	697	782	1,88
Seruyan	935	1.030	1.965	4,71
Katingan	918	1.231	2.149	5,15
Pulang Pisau	420	2.497	2.917	7,00
Gunung Mas	1.409	2.963	4.372	10,49
Barito Timur	476	1.535	2.011	4,82
Murung Raya	220	2.018	2.238	5,37
Palangka Raya	2.484	173	2.657	6,37
Kalimantan Tengah	15.456	26.232	41.688	100,00

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021, BPS

Lampiran 7. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel dan Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Kalimantan Tengah, 2021

Kabupaten/Kota	Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel	Mengakses Internet
(1)	(2)	(3)
Kotawaringin Barat	74,75	73,41
Kotawaringin Timur	69,78	60,47
Kapuas	62,99	43,32
Barito Selatan	73,20	57,61
Barito Utara	72,86	59,71
Sukamara	73,64	61,79
Lamandau	74,14	61,83
Seruyan	71,30	60,13
Katingan	68,64	45,39
Pulang Pisau	68,14	55,32
Gunung Mas	70,82	53,87
Barito Timur	70,81	56,99
Murung Raya	63,52	51,81
Palangka Raya	86,87	83,49
Kalimantan Tengah	71,62	59,97

Sumber: Susenas Maret 2021, BPS

Lampiran 8. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2021

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit
(1)	(2)
Kotawaringin Barat	26,34
Kotawaringin Timur	18,37
Kapuas	10,59
Barito Selatan	10,57
Barito Utara	19,89
Sukamara	25,05
Lamandau	24,58
Seruyan	8,43
Katingan	17,20
Pulang Pisau	20,14
Gunung Mas	16,20
Barito Timur	15,82
Murung Raya	6,75
Palangka Raya	26,18
Kalimantan Tengah	17,66

Sumber: Susenas Maret 2021, BPS

Lampiran 9. Persentase Rumah Tangga Yang Menerima PIP dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2021

Kabupaten/Kota	Penerima Program Indonesia Pintar (PIP)	Penerima KPS/KKS		
		Ya, dapat menunjukkan kartu	Ya, tidak dapat menunjukkan kartu	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	2,64	3,88	1,94	94,18
Kotawaringin Timur	4,38	5,46	1,69	92,85
Kapuas	7,60	2,57	3,53	93,90
Barito Selatan	5,49	2,93	0,69	96,38
Barito Utara	1,91	2,39	1,94	95,67
Sukamara	3,18	1,50	0,77	97,73
Lamandau	3,27	2,36	1,47	96,18
Seruyan	3,57	0,59	1,51	97,90
Katingan	1,15	2,00	1,00	97,00
Pulang Pisau	4,63	3,05	1,58	95,36
Gunung Mas	1,74	2,23	2,65	95,12
Barito Timur	2,81	2,44	0,41	97,15
Murung Raya	1,83	1,01	1,73	97,26
Palangka Raya	1,79	1,71	0,76	97,53
Total	3,66	2,83	1,72	95,45

Sumber: Susenas Maret 2021, BPS

ISTILAH TEKNIS



Air Minum Bersih

Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) > 10 meter.

Angka Beban Tanggungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Harapan Hidup pada waktu Lahir

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka Kematian Bayi

Probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)

Banyaknya kelahiran per seribu wanita dari golongan umur 15-49 tahun yang terjadi pada waktu tertentu.

Angka Kelahiran Total

Banyaknya anak yang diperkirakan dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu tanpa memperhitungkan angka kelangsungan hidup wanita.

Angka Kelahiran Kasar

Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran untuk setiap seribu penduduk yang terjadi di suatu daerah pada waktu tertentu.

Angka Kesakitan

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Angka Melek Huruf

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah

Rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.

Angka Putus Sekolah

Proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni

Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai bekerja.

Indeks Gini

Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya

Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Lapangan Usaha

Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Kegiatan in mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indoonesia (KBLI) dalam satu digit.

Masih Bersekolah

Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Pengangguran Terbuka

Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah :

- a. yang mencari pekerjaan
- b. yang mempersiapkan usaha
- c. yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
- d. yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Pekerja Tidak Dibayar

seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji

Perjalanan

Melakukan perjalanan pergi pulang (PP) sejauh minimal 100 Kilometer dan tidak dalam rangka mencari nafkah dan tidak dilakukan secara rutin

Perkotaan

Karakteristik sosial ekonomi dari wilayah administratif terkecil. Wilayah ini dikatakan sebagai perkotaan jika memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, lapangan kegiatan ekonomi utama, fasilitas-fasilitas perkotaan (jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya). Secara operasional penentuan daerah perkotaan dibuat dengan sistem skoring tertentu. Prosedur penentuan daerah perkotaan berlaku sejak tahun 1980 dan masih berlaku hingga saat ini.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.

Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Status Gizi

Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Kategori status gizi ini dibuat berdasarkan Standar WHO/NCHS.

Status Pekerjaan

kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

Tamat Sekolah

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

ISSN 2354-7855



9 772354 785001 >

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Kapten Piere Tendean No.06, Palangka Raya, 73112

Telp: (0536) 3228105, Fax: (0536) 3221380

Homepage: <http://kalteng.bps.go.id>, Email: bps6200@bps.go.id